

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DI NAGARI MUARO PAITI, KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT**

Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Hamdillah Afdhal

1806016040

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo
Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Hamdillah Afdhal
NIM : 1806016040
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Nagari Muaro Paiti, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,



Muhammad Mahsun, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DI NAGARI MUARO PAITI, KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT
(Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur)

Disusun Oleh:

Hamdillah Afdhal

1806016040

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 desember
2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji:

Ketua



Dr. Anwan Tanani M.Ag.
NIP: 197809302003121001

Sekretaris



Muhammad Mahsun, M.A
NIP: 198511182016011901

Penguji I



Drs. Nur Syamsudin M.A
NIP: 196805051995031002

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A
NIP: 198511182016011901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Hamdillah Afdhal menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan Di Nagari Muaro Paiti, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus: Pembangunan Infrastruktur)” merupakan hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Desember 2022

Yang menyatakan,



Hamdillah Afdhal

NIM. 1806016040

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat beserta taufik dan hidayah-Nya. Shalawat juga salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Tata Kelola Pemerintah Nagari Di Sumatera Barat (Studi Partisipasi di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX). Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum.
3. Drs. Nur Syamsudin, M.A., dan Muhammad Mahsun, M.A., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Drs. Nur Syamsudin, M.A., selaku wali dosen penulis selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
5. Muhammad Mahsun, M.A., selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan, nasihat dan membimbing hingga terciptanya skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak dan Ibu penulis, Bapak Aidil Fitri. B S.Ag., M.M., dan Ibu Ruwaida S.Ag., serta saudara kandung penulis, Ridhwanul Akbar yang telah

memotivasi dan mendoakan penulis sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.

9. Wali Nagari beserta perangkat Nagari dan masyarakat Nagari Muaro Paiti yang telah memberikan informasi kepada penulis terkait penulisan skripsi.
10. Lembaga Nagari Muaro Paiti, Badan Permusyawaratan Nagari serta Niniak Mamak di Nagari Muaro Paiti
11. Rekan-rekan dekat penulis, Huzairah Aflah, Tiara Candra Wijayanti, Andreas, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Ilmu Politik 18 yang senantiasa mendampingi penulis.
13. Seluruh pihak yang membantu penyusunan skripsi ini.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, Kritik dan saran sangat penulis butuhkan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Semarang, 12 Desember 2022

Penulis



Hamdillah Afdhal

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

*Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam
Saya persembahkan sebuah karya ini untuk diri saya sendiri, kedua orang tua
saya Bapak Aidil Fitri. B S.Ag., M.M., dan Ibu Ruwaida S.Ag., yang telah
memberikan seluruh doa dan
dukungan serta menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan
Untuk dosen wali dan pembimbing saya, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A.,
Bapak Muhammad Mahsun, M.A. yang telah memberikan segala ilmu dan
bimbingannya serta motivasi terbesar agar bisa menjadi orang hebat seperti
beliau.*

*Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk
menorehkan sepercik tinta sejarah dan pijakan awal kesuksesan saya di masa
depan.*

MOTTO

*“Jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya
(Warrant Buffet)*

ABSTRAK

Desa memiliki dua asas yakni asas subdiaritas dan asas rekognisi. Asas subdiaritas dalam undang-undang desa adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk masyarakat desa setempat. Sedangkan asas rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul, artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya. Berbeda dengan sebelum adanya peraturan ini adalah dahulunya desa atau nagari hanya sebagai objek pembangunan Pemerintah daerah, sekarang menjadi subjek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri. Dengan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di Nagari Muaro paiti, studi kasus pembangunan infrastruktur. Kajian ini berusaha menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama Bagaimana warga menyampaikan aspirasi politiknya dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti? Kedua Aspirasi politik siapa yang banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti?.

Studi ini menggunakan teori partisipasi politik yang menjelaskan terkait pola partisipasi masyarakat,serta peranan aktor adat dalam pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh data terkait tata kelola pemerintah nagari Muaro Paiti. data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan kepustakaan.

Kajian ini menjelaskan pola dan ruang partisipasi masyarakat terkait pembangunan serta pengaruh adat dalam kebijakan yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti, pola partisipasi masyarakat terbagi atas dua kelompok yaitu formal dan infromal. Studi ini juga menemukan aktor yang menjadi pemegang peran penting dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti.

Kata Kunci : Pola Partisipasi, Kebijakan, Adat, Nagari Muaro Paiti

ABSTRACT

The village has two principles, namely the principle of subdiversity and the principle of recognition. The principle of sub-diversity in the village law is the establishment of local-scale authorities and local decision-making for the local village community. Meanwhile, the principle of recognition is recognition of the rights of origin, meaning that the existence of a village which may have existed for a long time with all the customs and customary laws owned by local communities is recognized. Unlike before this regulation, it was that formerly the village or nagari was only an object of development for local governments, now it is the subject of development that manages the village independently. By examining people's political participation in governance in Muaro paiti Village, a case study of infrastructure development. This study seeks to answer two research questions. First How do citizens convey their political aspirations in the process of infrastructure development in Muaro Paiti Village? Secondly Whose political aspirations influenced the decision-making process of infrastructure development in Muaro Paiti Village?.

This study uses political participation theory that explains the patterns of community participation, as well as the role of indigenous actors in development. This research uses qualitative research methods with a case study approach to obtain data related to government governance in Muaro Paiti Village. Primary data were obtained from interviews, observations and literature.

This study explains the pattern and space of community participation related to development and the influence of customs in policies carried out in Muaro Paiti village, the pattern of community participation is divided into two groups, namely formal and infromal. The study also found actors who play an important role in decision-making of infrastructure development in Muaro Paiti village.

Keywords: Participation Patterns, Policies, Customs, Muaro Paiti Village

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. TINJAUAN PUSTAKA	5
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitan.....	8
2. Sumber dan Jenis Data.....	8
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik analisis data.....	10
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II.....	12
TEORI PARTISIPASI POLITIK.....	12
BAB III	17
Gambaran Umum Nagari Muaro Paiti	17
A. Letak Geografis Nagari Muaro Paiti	17
B. Demografi Nagari Muaro Paiti	19

C. Struktur Sosial dan Politik Nagari Muaro Paiti.....	20
D. Struktur Sosial Ekonomi Nagari Muaro Paiti	23
E. Gambaran Infrastruktur Nagari Muaro Paiti	25
BAB IV	29
RUANG DAN POLA PARTISIPASI MASYARAKAT MUARO PAITI	29
A. Ruang Partisipasi Formal	29
B. Ruang Patisipasi Informal.....	34
BAB V	45
AKTOR-AKTOR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN	45
A. Dominasi Adat Dalam Pengambilan Keputusan.....	45
B. Kepentingan Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur	49
BAB VI.....	55
PENUTUP	55
A. KESIMPULAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
Lampiran-lampiran	60

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Piramida Partisipasi Politik.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 3. 2 Peta Nagari Muaro Paiti.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 3. 3 Struktur Pemerintahan Nagari Muaro Paiti.....</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 3. 4 Kegiatan Adat Nagari.....</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 3. 5 Proses Pengolahan Gambir.....</i>	<i>24</i>
<i>Gambar 3. 6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 3. 7 Pembangunan Saluran Irigasi.....</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 3. 8 Rabat Beton Jalan.....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 3. 9 Posko Sementara PPKM.....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 4. 1 Kegiatan Pelantikan Wali Nagari</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 4. 2 Kegiatan Kelompok Politik di Nagari Muaro Paiti.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 4. 3 Kegiatan MUNA Nagari Muaro Paiti</i>	<i>37</i>
<i>Gambar 4. 4 Pelaksanaan Perbaikan Jalan</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 4. 5 Kunjungan Anggota DPRD</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 4. 6 Kegiatan Membangun Relasi.....</i>	<i>43</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Nagari Muaro Paiti Berdasarkan Jorong</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 3. 3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Nagari Muaro Paiti.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 5. 4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.....</i>	<i>50</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Nagari adalah nama lain untuk menyebut desa di Sumatera Barat. Berdasarkan pada UU Nomor 06 Tahun 2014 desa atau nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan warga setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Selain itu, desa atau nagari mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam hubungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau nagari memiliki 2 asas yakni asas subdiaritas dan asas rekognisi. Asas subdiaritas dalam undang-undang desa adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk masyarakat desa setempat. Sedangkan asas rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul, artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya. Berbeda dengan sebelum adanya peraturan ini adalah dahulunya desa atau nagari hanya sebagai objek pembangunan Pemerintah daerah, sekarang menjadi subjek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri (Putra, 2019).

Dalam rangka mendukung percepatan perkembangan desa, pemerintah pusat membuat kebijakan dana desa, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa atau nagari untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain dana desa, desa atau nagari memiliki sumber lain untuk melaksanakan kegiatannya, dana tersebut berasal dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa atau nagari paling sedikit sepuluh persen yang pembagiannya secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi alokasi dana khusus, dan realisasi laporan penggunaan dana desa tahap sebelumnya menjadi

dokumen prasyarat untuk mendapatkan dana desa dari kementerian terkait melalui Bupati/walikota berdasarkan PP No 8 2016.

Kekosongan regulasi yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang No 06 2014, secara spesifik bertujuan untuk mendorong kepala desa atau nagari untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Dalam hal ini kepala desa atau nagari harus mensinergikan demokrasi sebagai elit desa dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat desa atau nagari secara keseluruhan, demi kokohnya demokrasi secara nasional. Demokrasi desa atau nagari mewakili semangat UU Desa, dengan demikian demokrasi desa atau nagari dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan dan keunikan sesuai dengan tradisi adat istiadat desa atau nagari tersebut (Naini, 2015).

Dalam proses pembangunan demokrasi, pemerintah desa atau nagari menghadapi institusi adat, misalnya ketika program pembangunan yang hanya mengandalkan partisipasi masyarakat tanpa menempatkan posisi elit adat sebagai fokus utama dapat berpotensi menjadi faktor gagalnya fase implementasi dalam setiap program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (Fitria,2017). Salah satu faktor terjadinya disebabkan oleh sebagian elit adat masih memiliki kekuatan adat yang tidak terbatas, selain itu elit adat juga memiliki simpatisan adat yang akan menjadi salah satu penghambat pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintahan desa.

Kondisi ini menarik beberapa sarjana untuk mengkaji pembangunan demokrasi serta tata kelola pemerintahan desa, diantaranya Murray (2007), Suhardi (2016), Nugroho (2014). Murray (2007) dalam studi evaluasi kebijakan program kesejahteraan masyarakat di Indonesia, selalu ada elit lokal yang berkuasa yang menentukan kehidupan masyarakat di daerahnya, serta keterbatasan akses dan kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya juga menyebabkan elit adat dapat mempengaruhi pilihan politik dari masyarakat. Suhardi (2016) Partisipasi masyarakat yang tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi adalah sebuah hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa wajib memfasilitasi setiap kegiatan yang akan

dilakukan oleh warga desa. Nugroho (2016) Desa dan kelurahan memiliki tata kelola yang berbeda, kelurahan dianggap tidak demokratis secara administratif karena memiliki beberapa perbedaan dengan desa diantaranya, mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh kepala daerah, serta hak otonomi desa yang tidak dimiliki oleh kelurahan sebagaimana pada pasal 67 terkait hak otonomi desa, serta penyelesaian masalah yang langsung bersengketa secara hukum nasional.

Beberapa kajian terdahulu lebih banyak meneliti tentang tata kelola desa serta partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan desa. Belum banyak kajian yang membahas partisipasi politik masyarakat dalam tata kelola pemerintahan nagari dengan studi kasus pembangunan infrastruktur di wilayah yang mempunyai basis adat yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat di nagari dalam pengambilan keputusan dalam konteks wilayah yang memiliki institusi adat yang cukup kuat. Persoalan yang bisa dijawab nantinya adalah bagaimana ruang dan pola partisipasi masyarakat itu disediakan oleh pemerintah nagari, selain itu siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di dalam pembangunan nagari, kemudian bagaimana pengaruh adat di dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan nagari. Studi ini akan dilakukan di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Nagari Muaro Paiti merupakan salah satu nagari di Sumatera Barat yang masih mempertahankan posisi adat yang sangat sakral di tengah kehidupan masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, bukan hal yang tidak lazim lagi kalau elit adat seringkali menjadi aktor utama dalam menentukan beberapa keputusan penting yang akan diambil oleh pemerintahan nagari. Hal ini juga menyebabkan beberapa kali terjadinya tarik ulur kepentingan antara elit adat yang berhadapan dengan pemerintah dinas terkait dalam beberapa kebijakan yang sering kali tidak mencapai titik kesepakatan. Padahal ada masyarakat biasa yang sebenarnya juga memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi untuk memberikan aspirasi kepada pemerintahan nagari (Masnijon, 2021).

Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di Nagari Muaro Paiti dengan studi kasus

pembangunan infrastruktur di nagari. Kajian ini akan memperoleh studi data dan arena perihal bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam ruang dan pola terkait infrastruktur dan aspirasi politik siapa yang mempengaruhi pemerintahan nagari dalam membuat keputusan ketika ada musyawarah nagari atau dalam rapat lainnya yang diadakan oleh pemerintahan Nagari Muaro Paiti, agar penulis juga dapat mengetahui sejauh mana kekuatan elit adat ketika berhadapan dengan institusi pemerintah yang ada di Nagari Muaro Paiti. Dari data yang diperoleh penulis mendapatkan hasil bahwasanya masyarakat Nagari Muaro Paiti lebih suka menyampaikan aspirasi kepada lembaga atau organisasi terkait sesuai dengan aspirasi yang ingin mereka sampaikan dan adat sebagai kendali utama penentu arah kebijakan, karena dipengaruhi oleh posisi adat sebagai pemilik wilayah dan adat yang masih kental. Untuk lebih jelasnya, penulis akan membahasnya pada bab 4 dan 5 pada skripsi ini.

Secara teoritis, dengan adanya kajian ini diharapkan memiliki manfaat membangun gagasan dalam diskursus wacana perdebatan tentang politik desa. Hal ini berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di nagari dengan studi kasus pembangunan infrastruktur serta pengaruh adat dalam kebijakan di nagari, selain itu kajian ini bisa menjadi referensi bagi sarjana lain atau mahasiswa lain dalam menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan desa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang lebih terarah, untuk mempermudah penelitian dan menganalisis penelitian, yaitu sebagai berikut::

1. Bagaimana warga menyampaikan aspirasi politiknya dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti?
2. Aspirasi politik siapa yang banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti?

C. TUJUAN

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sejauh apa kemampuan warga untuk menyampaikan aspirasi politiknya dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti.
2. Untuk Mengetahui Aspirasi politik siapa yang banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan Skripsi ini terdapat dua manfaat yang nantinya akan didapatkan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Dengan adanya hasil kajian ini diharapkan memiliki manfaat membangun serta menyumbangkan gagasan diskursus dalam wacana perdebatan tentang politik desa, selain itu menjadi referensi sarjana lain atau mahasiswa lain dalam menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai memenuhi prasyarat kelulusan pendidikan S1 UIN Walisongo Semarang.

b. Bagi Pembaca

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa juga sebagai rekomendasi masukan atau referensi dalam memperbaiki tata kelola nagari.

c. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumbangsih ilmu dalam Ilmu Politik dan menjadi pijakan literasi bagi Universitas untuk memperluas studi tata kelola Pemerintah serta menganalisis budaya politik yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum tinjauan pustaka adalah kerangka konseptual dalam penulisan penelitian, yang berfungsi sebagai dasar untuk studi teoritis, dalam penyusunan skripsi penulis merujuk pada kajian yang telah dilakukan terlebih dahulu, terkait studi tentang tata kelola desa atau nagari.

Hal tersebut bukanlah hal yang baru dalam literatur politik, ada beberapa sarjana yang sudah melakukan kajian dalam konteks desa, sedangkan dalam konteks nagari belum banyak, diantara beberapa kajian tersebut dapat dibedakan menjadi dua tema, partisipasi pembangunan desa dan pembangunan desa, berikut penjelasan lebih detailnya.

1. Partisipasi Pembangunan

Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa atau nagari, telah dilakukan oleh beberapa sarjana diantaranya Suhardi (2016), Palimbong (2018), Riskayanti (2021), Muklis (2015), Tomoning (2013). Suhardi (2016) menjelaskan bahwa transparansi ketersediaan informasi sudah tersedia di masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawasi secara bersama kebijakan terkait tata kelola desa. Suhardi juga menyebutkan penerapan UU No. 06 2014 di Desa Majannang juga sangat baik dan masyarakat juga menyambut dengan positif. Sedangkan dalam penelitian Pahombong (2018) kurangnya ketegasan pemerintahan desa serta sulitnya pendanaan dalam melaksanakan berbagai program di desa, hal ini tidak terlepas dari faktor penghambat seperti partisipasi aparat desa masih belum optimal dalam berbagai bidang kegiatan desa, kurangnya kedisiplinan dalam melakukan setiap pekerjaan, serta keamanan yang masih kurang meskipun kualitas sumber daya manusia di desa tersebut sudah mendukung untuk berjalannya pemerintahan yang baik. Riskayanti (2021) pemikiran yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintahan desa sangat minim sehingga masyarakat belum mampu menyampaikan aspirasi dengan baik, yang menyebabkan kurangnya kontribusi, serta terlihat masyarakat masih adaptis dalam mengembangkan potensi desanya. Muklis (2015) keterbukaan informasi pada setiap penyusunan dan implementasi kebijakan membuat masyarakat akan lebih mudah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan karena mereka merasa diajak untuk turut ikut dalam setiap kegiatan serta program yang direncanakan oleh desa. Tomoning (2013) menyampaikan bahwa desa memiliki otonominya sendiri dalam pengambilan kebijakan pembangunan, nilai ini tercermin dengan musyawarah disetiap pengambilan keputusan yang

akan di jalankan pemerintahan desa, hal ini dilakukan untuk menghormati budaya adat istiadat yang ada pada desa.

2. Pembangunan Desa

Studi tentang pembangunan desa atau nagari, telah dilakukan oleh beberapa sarjana diantaranya Apriani (2020), Partini (2018), Nirmala(2018), Dewi (2019). Apriani (2020) menjelaskan bahwa COVID-19 menyebabkan realokasi dana desa untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan menanggulangi dampak pandemi, sehingga menyebabkan pembangunan di desa berhenti sampai pandemi mulai berakhir. Partini (2018) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan memaksimalkan anggaran dana desa yang tersedia menunjukkan pencapaian yang tinggi dari pada tahun sebelumnya, hal itu di dukung oleh efektivitas anggaran yang di rancang oleh pemerintaah desa, sehingga masyarakat sangat mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Desa Balatangnya. Nirmala (2018) pelaksanaan pembangunan kurang efektif namun pada proses penyelenggaraan berjalan dengan baik dan optimal, sedangkan pada tahap untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat, seperti kurangnya sumber daya alam manusia, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi. Dewi (2019) penganggaran yang dilakukan pemerintah desa sudah cukup baik dan masyarakat sudah mendapatkan kepuasan karena daapat meningkatkan kesejahteraan massyarakat berkat pembangunan yang merata di setiap wilayah yang ada di desa.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka diatas, penulis mendapatkan kesimpulan kurangnya partisipasi masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pembangunan desa. Hal ini terjadi kerena masih rendahnya sumber daya manusia di desa yang menyebabkan minat serta kesadaran untuk ikut aktif berpartisipasi dalam menyukseskan pengelolaan desa belum muncul. Dalam kedua pembahasan tersebut belum ada pembahasan terkait bagaimana partisipasi pembangunan masyarakat yang kehidupan adat istiadatnya masih kental, serta tidak menemukan pembahasan terkait aspirasi politik siapa yang banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur. Maka

dari itu penulis ingin menggunakan dua fokus tersebut untuk mencari bagaimana partisipasi masyarakat adat yang ada di Nagari Muaro Paiti terhadap tata kelola pemerintahan nagari.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan taktik yang digunakan dalam pengumpulan data serta analisis data yang diperlukan, untuk menjawab masalah yang sedang diteliti (Furchan, 2007).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan studi kasus, serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan secara intensif terinci untuk mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang sedang diteliti (Rahardjo, 2017). Serta memberikan penjelasan tentang data yang didapat melalui wawancara, dokumentasi serta observasi di lapangan yang akan dijabarkan berupa kalimat. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan yang dilakukan menggunakan berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa sarjana sebelumnya (Hasan, 2008).

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya sumber data yang konkret dari lapangan, data penelitian terbagi atas dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan oleh peneliti, bentuk data ini bisa berbentuk dokumen hasil observasi dilapangan, catatan hasil wawancara dan data-data mengenai informan peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui observasi kepustakaan yang berasal dari penelitian-penelitian atau buku-buku yang sudah ada (Yusuf, 2017).

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam proses penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk teknik yang sering digunakan dalam pengumpulan data-data penelitian, secara sederhana wawancara merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Sugiono, 2013).

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara langsung, dengan narasumber seperti wali nagari, masyarakat biasa dalam cakupan kehidupan suku adat dan nagari, lembaga adat terkait, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta lembaga Pemerintahan perwakilan masyarakat di Nagari tersebut, seperti Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).

b. Observasi

Dalam penelitian ini observasi melibatkan pencatatan maupun rekaman hasil dari penelitian yang dilakukan secara sistematis serta pengamatan dari gejala-gejala yang diteliti, seperti pengamatan pergerakan warga, aparat Pemerintah Nagari serta pengaruh tokoh adat dalam pembentukan serta pelaksanaan Pemerintah di Nagari Muaro Paiti.

c. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan studi kepustakaan yang berhubungan dengan kajian teoretis dan referensi lain serta berkaitan dengan nilai dan budaya yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2013). Kajian pustaka dalam penelitian ini berbentuk jurnal, naskah, catatan, buku, dokumentasi, dan lain-lain.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pengumpulan data penelitian yang berupa peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip serta termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah penelitian (Ali, 2014). Hasil dari dokumentasi ini dikumpulkan sebagai data pelengkap di dalam penelitian yang berbentuk dokumen seperti, tulisan dan gambar yang diperoleh dari hasil observasi di tempat observasi.

4. Teknik analisis data

Dalam Penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis data deskriptif, yang mana data deskriptif merupakan data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata maupun gambar sehingga tidak menekankan pada angka-angka (Sugiono, 2013). Selanjutnya peneliti bakal menganalisis data menggunakan interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik yaitu pandangan yang berawal dari wawancara dengan informasi yang telah peneliti tentukan dalam penelitian ini sebagai informan kunci atau yang bisa memberikan data dalam penelitian ini. Sedangkan data emik adalah data yang berasal dari pandangan peneliti sehingga melalui data yang didapat peneliti bisa menggambarkan bagaimana tata kelola Pemerintah Nagari di Sumatera Barat dengan studi kasus Nagari Muaro Paiti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penjabaran data yang didapat dari observasi penelitian dan dijabarkan secara deskriptif yang sistematis, secara keseluruhan terbagi menjadi bagian awal, bagian profil, bagian isi dan bagian akhir. Dalam penelitian ini penulis membagi penelitian ke dalam lima bab. Adapun susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini peneliti akan menjelaskan secara detail terkait teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya agar peneliti bisa membahas secara mendalam dan mengolah data yang tersedia secara akurat.

BAB III LANSKAP NAGARI MUARO PAITI

Bab ini menggambarkan lokasi penelitian sebagai sumber penelitian yaitu Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV RUANG DAN POLA PARTISIPASI WARGA

Bab ini menjelaskan hasil dari observasi yang telah dilakukan di lapangan serta dilakukan analisis terkait pola partisipasi warga di Nagari Muaro Paiti.

BAB V AKTOR-AKTOR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bab ini akan menjelaskan hasil dari observasi yang telah dilakukan di lapangan serta dilakukan analisis terkait aktor-aktor yang ada di dalam pengambilan keputusan di Nagari Muaro Paiti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta akan memberikan saran-saran yang bersifat membangun.

BAB II

TEORI PARTISIPASI POLITIK

Sebuah penelitian membutuhkan tolak ukur yang jelas atau dasar pemikiran untuk memecahkan masalah yang dikandungnya, teori merupakan aliran logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis serta memiliki tiga fungsi yaitu untuk menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan suatu gejala (Sugiono, 2013). Teori bisa dipahami sebagai generalisasi suatu kejadian dari interaksi yang muncul serta menarik untuk dipahami secara konsep yang terstruktur, menjadi sebuah alat kajian untuk membantu kita dalam melihat dan menganalisis suatu kejadian. Teori selalu menggunakan konsep-konsep, konsep lahir dari pemikiran manusia maka dari itu konsep selalu bersifat abstrak (Budiarjo, 2008). Maka dari itu dibutuhkan beberapa teori yang relevan dengan masalah yang akan dihadapi sebagai pisau analisis untuk menjelaskan suatu kejadian dengan teori-teori yang merupakan serangkaian konsep, melalui teori yang akan digunakan maka peneliti akan mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Partisipasi Politik berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keterlibatan setiap warga negara dalam proses politik, hal ini tidak hanya berfokus pada pemilihan politik, tetapi lebih dari pada itu. Dalam rangka mengkaji partisipasi masyarakat di Nagari Muaro Paiti terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari maka peneliti menggunakan teori dibawah ini.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, yang bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif, yang berfokus pada kegiatan yang dilakukan bukan terhadap sikap politik seseorang, dalam partisipasi, sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan, konsep ini sangat penting dalam arus pemikiran demokrasi musyawarah.

Terdapat hal-hal yang bersifat substantif dalam partisipasi politik yaitu, kegiatan yang bersifat nyata yang bisa diamati dengan kasat mata bukan bersifat orientasi, bersifat sukarela dengan dorongan diri sendiri untuk ikut berpartisipasi, dilakukan oleh warga biasa dalam kehidupan bernegara, memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik dan memiliki tingkatan parsipasi politik (Abdulkarim, 2019).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), juga mengemukakan hal sebagai berikut:

“Di dalam masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan unsur satu golongan elit yang kecil, Petani, tukang dan pedagang yang merupakan bagian dari penduduk yang paling besar menyadari atau tidak bagaimana tindakan-tindakan pemerintah mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Akan tetapi biasanya tidak sampai terpikir oleh mereka bahwa mereka dapat atau perlu berusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah”

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat lapisan bawah dan keberadaan pada tempat wilayah yang masih tradisional tidak mengerti dan tidak mampu menyampaikan aspirasi politiknya dengan baik. Hal itu sering ditemui pada partisipasi pemilihan desa, mereka menganggap hal itu hanyalah sebuah kewajiban, bukan sebagai bentuk proses partisipasi sebagai warga yang memiliki hak dalam menentukan pilihan ketika terjadinya pemilihan desa (Abdulkarim, 2019). Selanjutnya Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), mengemukakan:

“Partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain diluar pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Yang pertama dinamakan partisipasi politik yang dimobilisasikan”

Dalam negara yang demokratis, masyarakat dikatakan sudah mampu melakukan partisipasi politik ketika mereka sudah mampu melakukan sesuatu atas kehendak mereka sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Begitu pula sebaliknya

ketika mereka masih di mobilisasi ketika melakukan pilihan maka partisipasi mereka belum mampu berpartisipasi dengan baik. Oleh karena itu masyarakat harus dituntut agar berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik yang ada, karena dengan adanya partisipasi yang meningkat, maka tekanan terhadap penyelenggaraan yang lebih baik oleh pemerintah akan terjadi, yang berdampak pada semakin berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang berwenang.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk- bentuk sebagai berikut:

- Kegiatan Pemilihan yang bukan hanya mencakup suara, tapi juga proses tahapan yang dijalani sebelum pemilihan dilaksanakan.
- Melakukan pendekatan (*lobbying*) secara individu atau berkelompok dengan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan serta keputusan terkait kebijakan.
- Kegiatan Organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utama mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditunjukkan kepada para pejabat dengan maksud memperoleh keuntungan untuk satu orang atau segelintir orang.
- Tindakan kekerasan (*violence*), kegiatan individu atau kelompok melakukan cara anarkis dengan dampak yang sangat besar di dalam lingkungan masyarakat, tujuannya adalah memberikan tekanan secara langsung kepada pemerintah dengan tujuan mempengaruhi penguasa ketika mengambil suatu kebijakan (Huntington, 1990).

Berbagai bentuk partisipasi tidak selalu berhasil dalam praktiknya karena tidak selalu berjalan lancar, banyak faktor yang menyebabkan hal itu bisa gagal antara lain karena kapasitas individu atau kelompok, kesadaran politik, kekhawatiran penguasa atau elit yang akhirnya partisipasi politik tidak berjalan dengan baik. Bentuk partisipasi dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), merupakan bentuk klasik, itu terjadi karena tidak membedakan kegiatan

yang dilakukan individu tersebut merupakan hal yang legal atau ilegal. Munculnya gerakan partisipasi politik terjadi karena beberapa hal yaitu modernisasi, perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan komunikasi, konflik antara kelompok pemimpin, keterlibatan pemerintah yang terlalu jauh dalam kehidupan masyarakat, berkurangnya rasa kepercayaan kepada pemerintah, dan rasa kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990), juga membagi landasan politik menjadi 4 landasan utama yaitu:

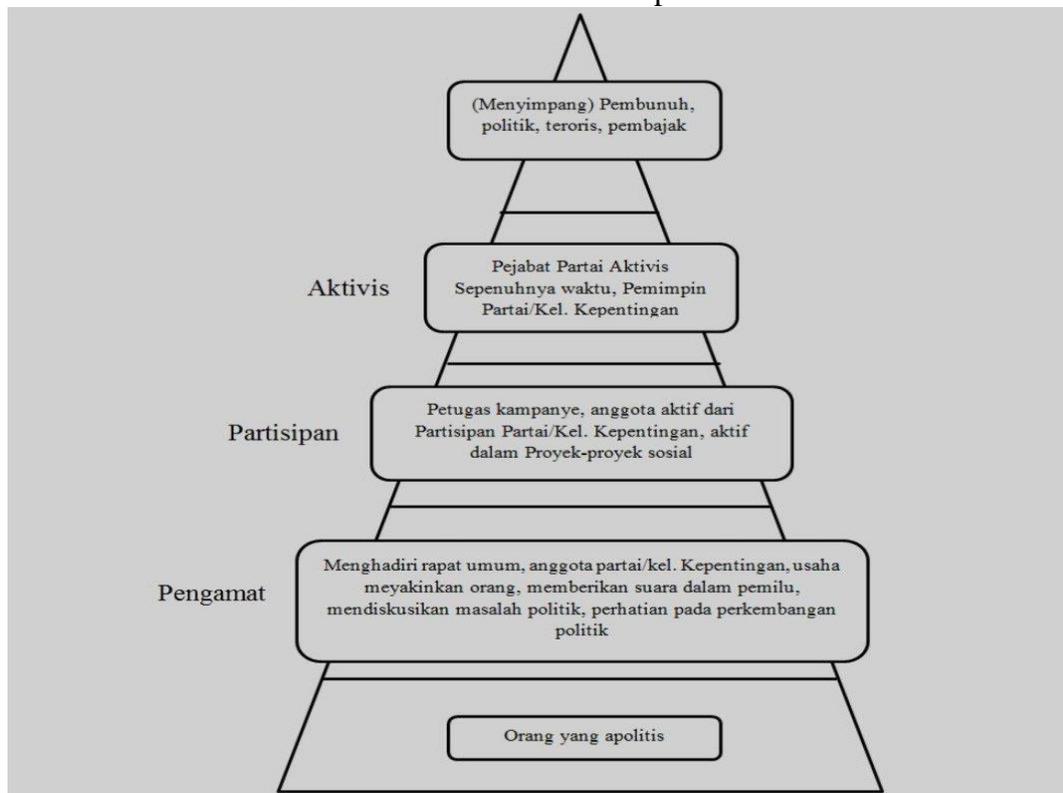
- Kelas individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
- Kelompok atau komunal, individu dengan asal usul, ras, agama dan suku atau etnis yang sama.
- Lingkungan individu yang memiliki jarak tempat tinggal yang saling berdekatan.
- Partai politik, individu yang berusaha menempatkan diri dengan organisasi formal yang sama dengan tujuan berusaha meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif maupun legislatif pemerintahan.

Menurut Robert Lane (1990), dalam studi terkait keterlibatan politik, menyebutkan partisipasi politik dapat memenuhi empat macam fungsi sebagai berikut:

- Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis
- Sebagai sarana untuk memenuhi suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial
- Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
- Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan psikologis tertentu.

Setiap partisipasi politik memiliki intensitas dan bentuk yang berbeda-beda, hal itu dapat dibedakan dari frekuensi dan intensitasnya. Menurut beberapa pengamat politik frekuensi yang besar dengan intensitas kecil merupakan golongan dari pemilih politik, sedangkan frekuensi yang kecil dengan intensitas yang besar merupakan aktor dari politik tersebut atau bisa disebut kelompok kepentingan, hal itu bisa digambarkan dengan piramida dibawah (Abdulkarim, 2019).

Gambar 2. 1 Piramida Partisipasi Politik



Sumber : (David F Roth dan Frank Lwilson 1980)

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa kelompok paling bawah merupakan kelompok apolitis, mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam memberikan partisipasi politiknya dikarenakan berbagai macam hal salah satunya kurangnya kesadaran akan pentingnya memberikan partisipasi politik. Sedangkan kelompok kedua adalah pengamat yang biasanya memiliki tugas untuk membicarakan politik, mengikuti rapat dan mengikuti perkembangan politik yang terjadi di media. Selanjutnya adalah kelompok partisipan yang memiliki aktivitas dalam berkampanye, anggota aktif partai politik, dan kelompok kepentingan proyek sosial. Kelompok berikutnya adalah kelompok aktivis, memiliki anggota yang berjumlah sedikit, mereka merupakan pejabat partai atau pemimpin kepentingan (Rahman, 2007).

BAB III

Gambaran Umum Nagari Muaro Paiti

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat Nagari Muaro Paiti terhadap pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti, penting kiranya penulis memberikan gambaran mengenai lokasi yang menjadi tempat penelitian. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok yang menjadi reaksi atas suatu hal/peristiwa tidak terlepas dari perubahan kehidupan pada wilayah tersebut. Oleh sebab itu pada bab 3 ini penulis akan menggambarkan potret lokasi penelitian melalui penjelasan letak geografis dan juga menjabarkan mengenai demografis serta perubahan struktur sosial-politik dan sosial-ekonomi serta perkembangan Covid-19 yang melanda Nagari Muaro Paiti beberapa waktu lalu agar salah satu tujuan penelitian ini tercapai, yaitu perbedaan pola partisipasi masyarakat dan pengaruh terhadap pembangunan ketika sebelum, ketika, dan sesudah wabah Covid-19 ada di Nagari Muaro Paiti berdasarkan data dari sumber yang dapat di percaya..

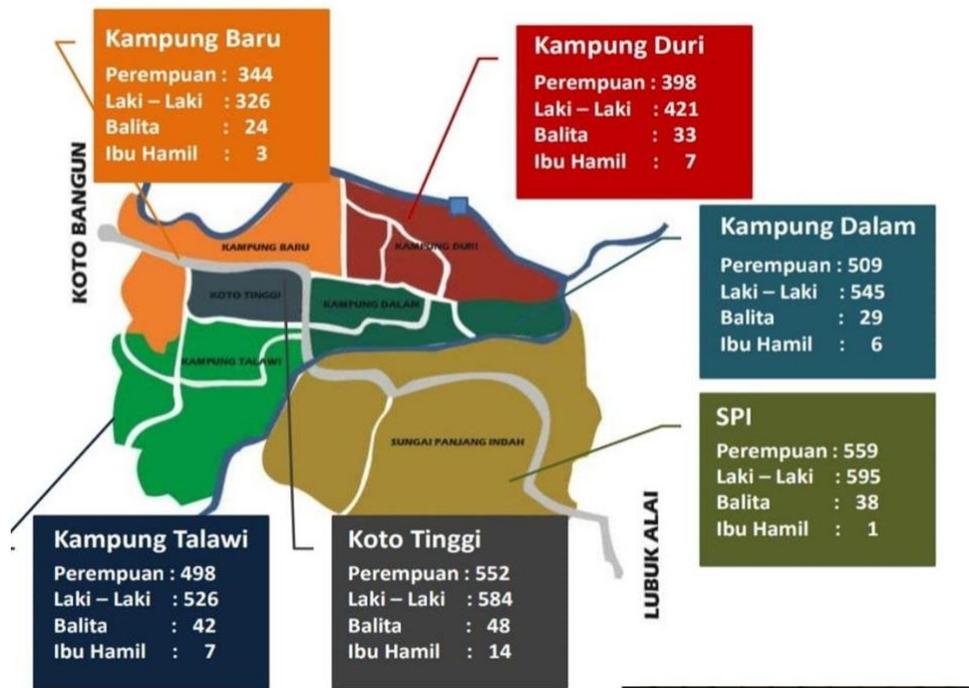
A. Letak Geografis Nagari Muaro Paiti

Nagari Muaro Paiti merupakan nagari yang terletak di Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Muaro Paiti memiliki wilayah seluas 9.500 Ha atau 13,13 persen dari luas wilayah Kecamatan Kapur IX. Nagari Muaro Paiti berada di bagian timur Kabupaten Lima Puluh Kota, berada di dataran rendah dengan suhu rata-rata 23-30°C (Profil Nagari Muaro Paiti). Adapun Nagari Muaro Paiti berbatasan langsung dengan :

Sebelah Timur : Nagari Lubuk Alai
Sebelah Barat : Nagari Koto Bangun
Sebelah Utara : Kampar
Sebelah Selatan : Nagari Koto Lamo

Berikut ini gambaran wilayah Nagari Muaro Paiti beserta dengan nama jorong yang ada di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX :

Gambar 3. 2 Peta Nagari Muaro Paiti



Sumber : (Ekspose Wali Nagari Muaro Paiti 2022)

Secara administratif, Nagari Muaro Paiti dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih melalui pemilihan umum wali nagari setiap lima tahun. Dalam menjalankan pemerintahannya, Wali Nagari Muaro Paiti dibantu oleh perangkat nagari berdasarkan tugas dan fungsi tiap-tiap bagiannya, serta ada enam kepala jorong yang bertugas memimpin jorong yang ada di Nagari Muaro Paiti

Keberadaan Nagari Muaro Paiti sangat jauh dari pusat pemerintahan daerah atau provinsi, untuk bisa sampai ke pusat pemerintahan daerah kita harus menempuh perjalanan sejauh 78 km atau 2,5 jam menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum yang hanya berangkat satu kali sehari pukul 5 pagi setelah subuh. Sedangkan jarak yang harus di tempuh ke pusat pemerintaahan provinsi sejauh 204 km atau 5,5 jam dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum berupa travel yang hanya berangkat satu kali sehari pukul 7 pagi (Observasi, 23 Oktober 2022).

B. Demografi Nagari Muaro Paiti

1. Kondisi Penduduk

Berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil Nagari Muaro Paiti tahun 2022, jumlah penduduk Nagari Muaro Paiti mencapai 5,860 jiwa. Dengan presentasi laki-laki 51,15% atau 2,997 jiwa dan perempuan 48,25% atau 2,860 jiwa. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jorong tempat tinggal :

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Nagari Muaro Paiti Berdasarkan Jorong

NO	JORONG	LAKI-LALI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SPI	595	559	1.154
2	TALAWI	526	498	1.024
3	KP. BARU	326	344	670
4	KP. DALAM	545	509	1.054
5	KOTO TINGGI	584	552	1.136
6	KP. DURI	421	398	819
JUMLAH		2.997	2.860	5.860

Sumber : (Ekspose Wali Nagari Muaro Paiti 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwasannya kepadatan penduduk Nagari Muaro Paiti merata di setiap jorong yang ada di Nagari Muaro Paiti. Data ini bertujuan juga untuk menggambarkan bagaimana masyarakat setiap jorong mampu menyampaikan aspirasi politiknya di bidang pembangunan Nagari Muaro Paiti, serta saling adu kepentingan tokoh adat yang ada di setiap jorong tersebut.

2. Tingkat Pendidikan

Menurut Edgar Dalle, pada dasarnya pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga-lembaga pendidikan resmi yang didirikan oleh pemerintah maupun perorangan, tetapi juga pendidikan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masa mendatang (Niswanti, 2019). Dalam pendidikan formal terjadi proses pengembangan dan pengarahan kemampuan yang dimiliki seseorang secara terprogram dan disengaja. Sehingga semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin banyak pula proses pengembangan dan pengarahan yang dilalui dan didapatkan seseorang yang dapat mempengaruhi persepsi mereka.

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	TIDAK TAMAT SEKOLAH	550
2	SD	2150
3	SMP	1150
4	SMA	570
5	SARJANA	95
JUMLAH		4515

Sumber : (Data Kantor Kenagarian 2018)

Chairul Anwar (2017) dalam bukunya Teori-teori pendidikan menyatakan bahwa manusia akan berkembang dan menentukan kejiwaannya sendiri berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungannya. Oleh sebab itu pendidikan juga kemudian menentukan bagaimana cara masyarakat Nagari Muaro Paiti ikut terlibat dalam berpartisipasi dalam tata kelola desa di bidang infrastruktur.

Berdasarkan data dari tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Muaro Paiti yang lulus SLTA dan jenjang di atasnya hanya 15% dari keseluruhan penduduk sedangkan sisanya mayoritas lulusan SD sederajat. Hal itu terjadi akibat minimnya sarana dan prasarana pendukung pendidikan pada masa lalu yang ada di Nagari Muaro Paiti serta jauhnya lokasi sekolah yang ada pada waktu itu menjadi kendala bagi masyarakat untuk menempuh bangku pendidikan.

Berbeda dengan saat ini dimana sarana dan prasarana pendidikan yang ada di nagari sudah sangat cukup dan lengkap bagi masyarakat untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan. Sehingga beberapa tahun kedepan diharapkan data pendidikan tersebut akan lebih di dominasi oleh masyarakat yang pendidikan tinggi agar bisa lebih berpartisipasi dalam kemaajuan Nagari Muaro Paiti.

C. Struktur Sosial dan Politik Nagari Muaro Paiti

Nagari Muaro paiti di kenal sebagai nagari yang memiliki adat yang masih melekat dalam kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut di dukung dengan adanya kegiatan keagamaan serta adat yang berbasis di setiap surau suku di Nagari Muaro

Paiti yang pelaksanaannya dilakukan dalam waktu satu kali dalam setiap minggunya di hari jumat (Wawancara, Nazar, 24 Oktober 2022).

Selain itu Nagari muaro paiti dikenal sebagai nagari sumber produksi gambir, yang merupakan produk andalan untuk di jual ke luar negeri. Oleh karena itu pemerintah Nagari Muaro Paiti merumuskan visi dan misi yang sesuai dengan kultur masyarakat Nagari Muaro Paiti, berikut visi dan misi tersebut (Profil Nagari Muaro Paiti) :

Visi

"Mewujudkan Nagari Yang Mandiri Dan Madani, Serta Seimbang Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat "

Misi

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Anak Nagari
- Memberdayakan Ekonomi Masyarakat
- Meningkatkan Kehidupan Beragama Dan Beradat Dalam Segala Gerak Kehidupan Masyarakat
- Menumbuhkan Rasa Persaudaraan Dan Kebersamaan, Ciak Raso Pareso Raso Jo Raso, Jo Maraso Punyo Awak Basamo Yo Harus Dijago
- Memberikan Pelayanan Yang Baik Terhadap Masyarakat Dan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa.

Gambar 3. 3 Struktur Pemerintahan Nagari Muaro Paiti



Sumber : (Data Ekspose Nagari)

Kehidupan bersuku dan beradat yang sudah bertahan lama menjadi salah satu alasan kehidupan masyarakat di Nagari Muaro Paiti berjalan dengan baik dan tentram, dikarenakan semua permasalahan yang ada bisa di selesaikan dengan cara adat dan sangat jarang suatu permasalahan yang ada dibawa ke ranah hukum. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat juga sering bergotong royong dan saling membantu satu sama lain ketika mendapatkan musibah di Nagari Muaro Paiti. hal ini disampaikan oleh seorang datuk adat:

“Dalam iduik ba adat di nagoghi ko awak harus saling manghargai jo manolong. Sasuai j kato adat kaba elok baimbaauan, kaba buruak bahambauan, jan sampai dk zaman nan maju awak makin jauh jka tradisi nan lah lai salamoko” (Wawancara, Datuak Bosa, 24 Oktober 2022).

Terjemahan: Dalam Hidup beradat di nagari, kita harus saling menghargai dan membantu. Sesuai dengan kata adat kabar baik disampaikan kabar buruk datang bersama, tradisi tidak boleh hilang meskipun zaman semakin maju.

Gambar 3. 4 Kegiatan Adat Nagari



Sumber : (Data Ekspose Nagari)

D. Struktur Sosial Ekonomi Nagari Muaro Paiti

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari data ekspose Nagari Muaro Paiti Awalnya mayoritas penduduk Nagari Muaro Paiti bermata pencaharian sebagai seorang petani dengan hasil pertanian utamanya dalam bentuk getah karet dan gambir. Hasil produksi bahan mentah tersebut kemudian dijual kepada toke atau juragan gambir untuk kemudian di ekspor ke berbagai negara, salah satu negara tujuan yang memiliki minat pasar yang cukup tinggi adalah negara india. Menurut Ap, sebagai petani gambir. Gambir termasuk bahan kosmetik serta konsumsi bagi warga India yang memiliki harga rata-rata 50 ribu rupiah per kilogram untuk pembelian di Nagari Muaro Paiti. seperti yang disampaikan oleh seorang petani:

“Gambiagh ka ughang india moli yuang, ogo tagantuang inyo nyia, min sedang prolu dek inyo naiak ogo, tu kalau ndo lo banyak ladang ughang nan bakampo a ro. Min ndo mpak wang nyia yuang, dapek-dapek ntuaak balanjo yia nyia, kini lai stabil ogo tapi ndo maha nagh la yuang” (Wawancara, Ap, 24 Oktober 2022).

Terjemahan: Gambir di beli orang india, harga tergantung dia, kalau sedang butuh harga bisa naik dan ketika barang sedikit, kalau barang banyak yang tersedia harga tidak mahal, namun sekarang harga mulai stabil.

Apabila dilihat dari potensinya, gambir memiliki potensi yang sangat menjanjikan, namun belum banyak masyarakat yang bisa mengolahnya menjadi

barang produksi, masyarakat baru bisa sebatas menjadikannya bahan mentah yang siap untuk dijadikan bahan produksi. Oleh karena itu patokan harganya hanya seberapa banyak bahan mentah yang dibutuhkan oleh pengusaha dari India.

Gambar 3. 5 Proses Pengolahan Gambir



Sumber : (Dokumentasi pribadi 29 Januari 2021).

Selain itu, hasil pertanian lain yang dihasilkan oleh petani Nagari Muaro Paiti adalah karet, sawit, dan lainnya yang merupakan bahan mentah berkualitas unggul karena faktor jenis tanah di lahan serta cuaca yang mendukung. Mereka lebih suka bertani karet dan gambir bukan tanpa alasan, menurut mereka hal itu lebih cocok dari pada melakukan pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dikarenakan lahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang menyebabkan rentannya serangan hewan liar di lahan mereka nantinya, serta waktu panen yang terlalu lama dan tidak dapat dijadikan penghasilan tetap untuk sekali seminggu yang biasanya dijadikan uang untuk belanja ke pasar (Wawancara, Ap, 24 Oktober 2022).

Tabel 3. 3 Jenis Pekerjaan Masyarakat Nagari Muaro Paiti

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	102
2.	TNI/POLRI	7
3.	Swasta	47
4.	Petani	1.535
5.	Tukang	42
6.	Buruh	262
7.	Jasa	49
8.	Orang Pensiun	69
9.	Peternak	80

Sumber : (Ekspose Wali Nagari Muaro Paiti 2022).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian terbanyak di Nagari Muaro Paiti adalah petani. Banyak dari masyarakat usia muda yang memilih bekerja menjadi petani di ladang gambir milik orang tuanya atau di ladang orang lain, mereka lebih memilih menjalani pekerjaan tersebut dikarenakan tidak memerlukan persyaratan khusus untuk bekerja, dengan modal tenaga dan bisa mencupak gambir mereka sudah bisa melakukan pekerjaan tersebut.

E. Gambaran Infrastruktur Nagari Muaro Paiti

Dalam mendukung visi indonesia maju yang berfokus ke peningkatan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan roda perputaran ekonomi, pariwisata, perkebunan, persawahan dan perikanan yang di rencanakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu Nagari Muaro Paiti juga melakukan beberapa pembangunan infrastruktur untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat di nagari.

Menurut salah satu aparat pemerintah nagari Muaro Paiti, terlepas dari program pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti sebelumnya sudah tertinggal dari daerah lain, sehingga membuat pemerintah nagari yang sekarang harus ekstra dalam melakukan pembangunan di nagari, agar mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan harapan pemerintah

mampu hadir ditengah keinginan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Sehingga daerah kita mampu bersaing dengan daerah lainnya baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi produk hasil pertanian karena memang sebagian besar penduduk nagari merupakan petani gambir (Wawancara, Zandra, 26 Oktober 2022).

Gambar 3. 6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari



Sumber : Ekspose Nagari 2022

Sejalan dengan yang disampaikan oleh salah satu perangkat nagari sebelumnya, pada gambar diatas juga terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja nagari yang menegaskan bahwa pemerintah nagari dengan nyata berfokus untuk melaksanakan program pembangunan di Nagari Muaro Paiti. Diketahui sejak masa pemerintahan Nagari Muaro Paiti priode tahun 2018 hingga sekarang, pemerintah nagari sudah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti.

Pembangunan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah nagari adalah bentuk kepedulian pemerintah terkait dengan kondisi wilayah nagari muaro paiti, karena beberapa tahun kebelakang nagari sudah mulai mengalami keadaan banjir ketika curah hujan mulai tinggi. Oleh karena itu irigasi menjadi solusi yang tepat bagi pemerintaah nagari dalam menanggulangi curah hujan yang tinggi ketika terjadinya musim hujan di Nagari Muaro Paiti. Sampai tahun 2022 sudah hampir semua titik yang rawan banjir sudah dibuatkan saluran irigasi yang saling

terhubung agar air tidak tergenang ke rumah warga, harapannya semoga warga juga ikut menjaga saluran irigasi tersebut dengan cara ikut merawat dan tidak membuang sampah sembaranga ke dalam saluran irigasi.

Akses jalan lingkar nagari yang juga mulai semakin diperhatikan oleh pemerintahan yang sekarang juga merupakan wujud hadirnya pemerintah nagari dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dilakukan agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah nagari memiliki aksi dalam mendukung pemerataan pembangunan transportasi di Nagari Muaro Paiti, sehingga nantinya semua jalan memiliki kemudahan akses dalam menunjang kebutuhan masyarakat.

Nagari Muaro Paiti juga sempat terdampak virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun lalu, menyebabkan banyaknya masyarakat ikut positif dalam kasus yang terjadi di Nagari Muaro Paiti. Pemerintah nagari sebagai pihak yang berwenang dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat juga ikut melaksanakan program pencegahan dan peduli Covid-19, berbagai kebijakan telah dilakukan seperti, pembangunan posko sementara, memberikan bantuan kepada setiap warga yang terdampak serta membuat alat cuci tangan di setiap titik keramaian Nagari Muaro Paiti (Wawancara, Aulia, 27 Oktober 2022).

Gambar 3. 7 Pembangunan Saluran Irigasi



Sumber : Dokumentasi Nagari, 1 Juni 2022

Gambar 3. 8 Rabat Beton Jalan



Sumber : Dokumentasi Nagari, 5 Juli 2022

Gambar 3. 9 Posko Sementara PPKM



Sumber : Dokumentasi Nagari, 7 Agustus 2021

BAB IV

RUANG DAN POLA PARTISIPASI MASYARAKAT MUARO PAITI

Pembahasan yang disajikan dalam Bab IV ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama, yaitu terkait bagaimana warga menyampaikan aspirasi politiknya dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti. Dengan adanya asas rekognisi dan subdiariatas menyebabkan masyarakat juga semakin aktif berperan dalam berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya terkait pembangunan infrastruktur di nagari. Masyarakat Nagari Muaro paiti memiliki kebiasaan untuk menyampaikan dan ikut berpartisipasi sesuai dengan bidang yang mereka sukai.

Masyarakat Nagari Muaro Paiti memiliki dua pola dalam menyampaikan aspirasi, yaitu secara formal dan informal. Hal itu terlihat dari banyaknya ruang aspirasi yang aktif di tengah kehidupan masyarakat Nagari Muaro Paiti dengan menunjukkan beragam minat dan kebutuhan masyarakat di nagari. Oleh karena itu penjelasan terkait dengan partisipasi masyarakat akan dikelompokkan menjadi dua macam pola dan berbagai ruang kelompok yang ada di Nagari Muaro Paiti, sehingga dapat memudahkan ketika memahami pola partisipasi masyarakat yang terjadi di Nagari Muaro Paiti. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan warga belum mampu menyampaikan aspirasi politiknya dalam ruang formal, sehingga menyebabkan masyarakat lebih aktif pada ruang informal ketika ikut berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti

A. Ruang Partisipasi Formal

Pola formal merupakan sesuatu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dengan keterkaitan tempat dan waktu acara. Pada pola formal, masyarakat Nagari Muaro Paiti memiliki ruang partisipasi pada pemilihan nagari dan musyawarah nagari sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Nagari

Pemilihan wali nagari di Nagari Muaro Paiti dilaksanakan setiap enam tahun sekali dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan yang diatur dalam peraturan bupati nomor 130 tahun 2021. Kegiatan pencalonan yang terjadi di nagari

dilakukan sama seperti pemilihan di tempat lainnya dimana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa melakukan pencalonan, calon yang dihadirkan untuk dipilih juga memiliki latar belakang yang beragam (Wawancara, Aidil, 25 Oktober 2022).

Dalam kontestasi pemilihan yang telah diselenggarakan, ada empat calon yang lolos memenuhi syarat agar bisa mencalonkan diri menjadi wali nagari. Setiap masing-masing calon wali nagari memiliki berbagai latar belakang seperti masyarakat biasa dalam struktur adat hingga orang yang memiliki latar belakang dan hubungan yang baik dengan adat (Observasi, 22 Oktober 2022).

Pada saat proses kampanye, kegiatan yang dilakukan oleh para calon di nagari Muaro Paiti adalah berkumpul dengan para tokoh adat atau anggota adat yang memiliki suku yang sama dengan calon tersebut. Tujuan dari kegiatan itu dilakukan adalah agar solidnya anggota persukuan mendukung atau memberikan suara kepada seorang calon yang memiliki suku yang sama. Sesuai dengan penjelasan narasumber berikut:

“Biaso dalam proses kampanye, sapa nan nyalon ko ngumpuang sanak pasukuaninyo untuak minto doa j dukungan, namo kegiatan biaso kumpua suku j nan prolu ba niniak mamak suku. Supayo anggota suku atau dunsanak ko bisa lo nyo obe kalau lai sanak pasukuan inyo nan soto dalam acara milih wali” (Wawancara, Inat, 3 November 2022).

Terjemahan: Biasanya dalam proses kampanye, orang yang mencalonkan diri menjadi wali nagari mengumpulkan orang yang memiliki suku yang sama dengan mereka untuk meminta doa dan dukungan, dengan nama kegiatan berkumpul anggota suku dengan dihadirkannya petinggi adat suku tersebut. Agar anggota suku tau kalau ada orang yang memiliki suku yang sama dengan mereka ikut serta dalam kontestasi pemilihan wali nagari.

Selain melakukan kegiatan adat, terdapat juga kegiatan politik uang yang dilakukan oleh calon wali nagari yang memiliki suara adat yang rendah. Akan tetapi cara ini tidak efektif pada pemilihan wali nagari yang terjadi di Nagari Muaro Paiti. Budaya politik uang masih dapat dibendung karena keteguhan masyarakat memegang prinsip bahwa tidak semuanya bisa dibayar dengan uang,

lebih baik memilih keluarga (*dunsanak*) dari pada harus memberikan harga diri dengan nilai yang tidak seberapa (Wawancara, Nabil, 29 Oktober 2022).

Meskipun dalam proses kampanye ada kegiatan kelompok persukuan dan politik uang, pada saat pemilihan masyarakat tetap bisa bebas menentukan calon yang akan dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Dalam hasil observasi dilapangan ditemukan bahwa kesamaan suku dan kegiatan acara adat masih menjadi faktor penting yang berpengaruh terkait hasil perolehan suara yang di dapatkan oleh para calon wali nagari, karena masyarakat masih menganggap dengan memilih calon yang memiliki suku yang sama dapat membuat mereka lebih merasa dekat dengan pemerintah nagari nantinya, dan juga merasa bahwa keinginan atau aspirasi terkait kebijakan dapat lebih mudah tersampaikan.

Gambar 4. 1 Kegiatan Pelantikan Wali Nagari



Sumber : Dokumentasi Nagari, 10 Februari 2018

Dari hasil pemilihan wali nagari yang telah dilakukan di Nagari Muaro Paiti, terdapat sebuah keunikan dimana pemenang pemilihan wali nagari memiliki hubungan dengan wali nagari sebelum mereka menjabat, hal itu ditemui ketika penulis melihat foto-foto orang yang pernah menjabat di kantor wali nagari, ternyata mereka yang menang pemilihan selama ini memiliki ayah atau kakek yang juga sebelumnya pernah menjabat sebagai wali nagari di masa lalu, ini

merupakan bukti bahwa adat masih berlaku di Nagari Muaro Paiti, yang dimana seseorang akan lebih dipandang ketika memiliki hubungan atau gelar kebesaran adat (Observasi, 1 November 2022).

Meskipun demikian, masyarakat Nagari Muaro Paiti tidak pernah mempermasalahkan hal terkait pemilihan wali nagari, karena sudah menjadi kebiasaan atau keunikan yang telah terjadi secara turun-temurun. Seseorang akan mampu menjadi wali nagari ketika mereka dianggap memiliki latar belakang yang bagus baik secara adat dan mampu membangun komunikasi seperti bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat yang ada di nagari. Masyarakat tidak merasa bahwa suara mereka tidak diwakili, karena masyarakat menilai setiap orang yang mencalon adalah orang terbaik yang ada di nagari untuk melanjutkan tugas memimpin Nagari Muaro Paiti (Wawancara, Gali, 2 November 2022).

2. Musyawarah Nagari

Musyawarah nagari juga merupakan salah satu ruang dari pola partisipasi formal di Nagari Muaro Paiti, kegiatan yang dilakukan secara tahunan untuk menyepakati rencana kerja pembangunan nagari yang disesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah nagari dalam waktu satu tahun atau dalam satu priode. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari persoalan yang dibahas terkait dengan skala prioritas pembangunan untuk tahun berikutnya, kegiatan itu dianggarkan dari berbagai sumber dana baik dari alokasi dana desa, pendapatan asli nagari dan sumber dana lainnya.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang Nagari Muaro Paiti dilakukan di kantor wali nagari, dihadiri oleh perwakilan kecamatan, pendamping desa, lembaga-lembaga nagari, kader jorong, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perangkat nagari. Pada proses musyawarah inilah aspirasi dari masyarakat Nagari Muaro Paiti yang terkumpul pada ruang dan pola informal disuarakan oleh tokoh masyarakat, karena nantinya kesepakatan yang dicapai dalam forum musyawarah nagari akan menghasilkan suatu rencana kerja pemerintah untuk tahun yang akan datang serta menyepakati delegasi untuk perwakilan nagari yang akan hadir pada musrembang tingkat kecamatan (Wawancara, Putra, 2 November 2022).

Jadi, berbeda dengan pemilihan wali nagari yang mana masyarakat terlibat langsung sedangkan pada musyawarah nagari masyarakat lebih diwakili oleh tokoh masyarakat. Adapun masyarakat yang datang biasanya hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, hal itu terjadi karena terhalang oleh faktor pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat nagari pada umumnya merupakan petani gambir. Oleh karena itu jika tokoh masyarakat tidak mampu menyampaikan aspirasi masyarakat pada forum ini dengan sebaik mungkin sebagaimana yang sebelumnya masyarakat sampaikan kepadanya, tentunya masyarakat akan merasa kecewa karena aspirasi yang mereka sampaikan pada ruang informal tidak tersampaikan dengan baik.

Dalam kegiatan musyawarah nagari, seringkali terjadi tarik ulur antara pemerintah nagari dengan tokoh masyarakat terkait dengan program pembangunan nagari. Pemerintah nagari dengan dukungan adat tentunya menginginkan kebijakan pembangunan yang menguntungkan mereka, baik secara materil atau lokasi pembangunan. Hal ini tentunya memicu kemarahan dari tokoh masyarakat, karena mereka merasa dirugikan. Keputusan tersebut dianggap karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang memberikan aspirasi kepada mereka pada ruang informal, bahkan mereka menganggap beberapa pembangunan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak efektif dan bermanfaat bagi masyarakat umum di Nagari Muaro Paiti sehingga pada musyawarah kali ini mereka menginginkan efektifitas tersebut lebih diperhatikan dari pada sekedar membangun tanpa manfaat yang dirasa tidak signifikan bagi masyarakat (Observasi, 2 November 2022).

Dari hasil yang disepakati pada musyawarah nagari tahun ini, pada tahun depan pemerintah Nagari Muaro Paiti masih fokus pada program pembangunan, karena pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan pembangunan sempat terhenti akibat bencana penyebaran wabah COVID-19. Hasil ini membuat masyarakat cukup puas karena infrastruktur yang ada di nagari semakin membaik, namun secara detail terkait titik pembangunan infrastruktur masih saja adanya titik pembangunan yang kurang memuaskan bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan narasumber:

“Rencana lah ancah nyia tapi kadang lokasi nan ndo sasuai, kadang lokasi nan ndo prolu ba buek jalan j bondagh, nan lokasi prolu indak, tutia jak dk tahun ko harus lbiah diawasi le msalah lokasi ro, kok bisa diubah ubah k nan tmpek nan lbiah prolu dk warga” (Wawancara, Fadilah, 2 November 2022).

Terjemahan: Rencana pembangunan sudah bagus, hanya saja lokasi pembangunan yang sering tidak efektif, oleh karena itu harus lebih diawasi lagi agar pembangunan lebih bermanfaat dan kalau bisa dipindahkan ke lokasi yang memang membutuhkan.

B. Ruang Patisipasi Informal

Masyarakat Nagari Muaro Paiti juga memiliki ruang dalam pola informal untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan aspirasi terkait pembangunan yang ada di Nagari Muaro Paiti, pada akhirnya nanti masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat pada forum formal dalam kegiatan musyawarah nagari. Hal itu terjadi karena masyarakat lebih suka ruang pada pola informal, dengan alasan masyarakat tidak memiliki keterikatan waktu dan bebas menyampaikan kapanpun dan dimanapun, selain itu masyarakat juga menganggap bahwa dengan ruang ini mereka lebih mudah atau leluasa menyampaikan aspirasi tersebut baik secara bahasa dan pemahaman agar bisa dilanjutkan pada ruang partisipasi formal oleh orang yang mereka percayai dan kompeten untuk melanjutkan aspirasinya. Pola informal terbagi atas beberapa ruang yaitu:

1. Kelompok politik

Kelompok politik merupakan bagian dari ruang informal yang ada di nagari, memiliki tugas mewakili keinginan masyarakat dalam menentukan kebijakan. Kelompok politik memiliki berbagai macam bentuk, salah satu kelompok politik yang ada di Nagari Muaro Paiti adalah partai politik. Kelompok atau organisasi yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam sebuah pemilihan, dengan tujuan mempromosikan gagasan terkait dengan kebijakan, partai politik tidak hanya terkait dengan calon akan tetapi juga terkait sukarelawan yang akan mendukung pergerakan dari partai (Ken, 2004). Kehadiran kelompok politik di Nagari Muaro Paiti diharapkan bisa menjadi tempat penyampaian aspirasi masyarakat khususnya terkait infrastruktur pembangunan. Perkembangan terkait

kelompok politik yang ada cukup berkembang dari kemunculan beberapa kelompok politik meskipun minimnya keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan yang dilakukan (Wawancara, Isan, 24 Oktober 2022).

Dari hasil observasi, peneliti juga menemukan fakta terkait kegiatan kelompok politik yang ada di Nagari Muaro Paiti tidak berjalan baik karena masih minimnya pengetahuan dan sosialisasi terkait politik di tengah kehidupan masyarakat Nagari Muaro Paiti. Hanya sebagian kecil dari mereka yang aktif dalam kelompok politik, karena menurut mereka untuk aktif dalam kelompok politik memerlukan biaya yang besar, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kita sudah cukup sulit, jadi tidak ada waktu untuk kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok politik, cukup mereka yang sudah kaya saja yang ikut. Pola pikir seperti itu yang menyebabkan masyarakat untuk enggan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok politik yang ada di wilayah Nagari Muaro Paiti. Seperti yang disampaikan oleh narasumber:

“Tujuan wak ngojong iko ka supayo lai ia pejabat nan nyadi jka nagoghi awak, lai jan paya yo wak minto tolong, taso paya kalau ndolai ughang wak nan mogang politik diate, koklai nan jka diawak paliang tido pembangunan diawak ka lai yo tek, lai ancak yia nagoghi wak ka e” (Wawancara, Sehat, anggota partai politik, 24 Oktober 2022)

Terjemahan: Tujuan kita melakukan supaya ada pejabat yang berasal dari Nagari kita, tujuannya agar kita tidak sulit lagi ketika memerlukan bantuan. Karena sulit kalau tidak ada orang dari nagari kita yang menjadi pejabat, harapannya kalau ada pejabat dari nagari kita setidaknya mereka nanti memberikan pembangunan untuk nagari kita, agar nagari kita juga bagus.

Gambar 4. 2 Kegiatan Kelompok Politik di Nagari Muaro Paiti



Sumber : Dokumentasi Pribadi Desember 2020

Ruang partisipasi masyarakat dengan wadah politik ini merupakan salah satu cara yang biasa digunakan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kekuatan sosial serta kedekatan dengan tokoh politik yang ada di Nagari. Menurut mereka dengan bergabung dan dekat dengan kelompok politik lebih efektif, karena bisa memberikan penekanan kepada pihak pemangku kepentingan politik dengan alasan yang bersifat saling membutuhkan dan menguntungkan dalam jangka pendek.

2. Lembaga masyarakat

Ruang lainnya yang dimiliki oleh masyarakat nagari dalam ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi mereka pada pola informal adalah melalui tokoh masyarakat yang menjadi anggota atau memiliki jabatan pada lembaga masyarakat nagari. Hal itu terjadi karena lembaga masyarakat di nagari memiliki tugas sebagai pengawas sosial maupun pemberi masukan terhadap kebijakan pemerintah, lembaga masyarakat terbagi menjadi beberapa kategori :

- Lembaga Ekonomi Masyarakat

Merupakan lembaga yang memiliki kegiatan ekonomi dengan tujuan demi terpenuhinya kebutuhan dari sebuah kelompok masyarakat. Bentuk partisipasi dari lembaga ekonomi masyarakat Nagari Muaro Paiti terlihat dari

pelaksanaan Peraturan Nagari Muaro Paiti Nomor 2 Tahun 2021 tentang sumber pendapatan asli Nagari Muaro Paiti yang akan menjadi salah satu dana yang digunakan dalam pembangunan di Nagari Muaro Paiti. selain itu lembaga ekonomi juga menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan infrastruktur penunjang ekonomi di nagari Muaro Paiti (Wawancara, Rando 24 Oktober 2022).

- Lembaga Keagamaan

Nagari Muaro Paiti memiliki lembaga keagamaan yang bernama Majelis Ulama Nagari (MUNA). Lembaga tersebut beraanggotakan para tokoh agama di nagari muaro paiti, yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai kontrol keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muaro Paiti. Dalam pola partisipasi lembaga ini khususnya mewakili aspirasi terkait dengan kegiatan keagamaan, infarastruktur tempat ibadah dan lainnya.

Gambar 4. 3 Kegiatan MUNA Nagari Muaro Paiti



Sumber : Dokumentasi Nagari, Agustus 2022

Beberapa masyarakat menganggap bahwa aspirasi mereka dapat lebih cepat diproses melalui anggota lembaga masyarakat yang ada di Nagari Muaro Paiti, penyampaian aspirasi melalui anggota lembaga masyarakat yang ada ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat biasa yang tidak memiliki kekuatan sosial, sehingga melalui lembaga masyarakat yang beranggotakan orang yang memang paham dalam bidang tersebut membuat aspirasi mereka lebih bisa tersampaikan dengan baik. Ditambah lagi dengan alasan kuat yaitu beberapa elit lembaga

masyarakat juga memiliki kebutuhan terkhusus infrastruktur di bidang pertanian karena mereka juga memiliki lahan pertanian sehingga akan sangat menguntungkan ketika menyampaikan aspirasi tersebut karena mereka juga sering merasa terwakili (Wawancara, Ipal, 25 Oktober 2022).

Tidak hanya sebatas aspirasi terkait dengan pertanian, kehadiran beberapa lembaga yang ada di Nagari Muaro Paiti tersebut juga diharapkan oleh masyarakat bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk ikut aktif dalam berpartisipasi dalam memberikan gambaran atau wacana terkait kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Nagari Muaro Paiti Kedepannya, sehingga jalannya pemerintahan Nagari Muaro Paiti lebih baik dan lebih berpihak kepada keinginan dari masyarakat yang tinggal di Nagari Muaro Paiti. seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber:

“Lembaga nagoghi nan lai ko wak manfaat samaksimal mungkin ntuak soto lo wak dalam pembangunan nagoghi awak ko, jadi pemerinta dapek lo wak agiah saran supaya efektif pembangunan di awak ko” (Wawancara, Rina, 25 Oktober 2022).

Terjemahan: Lembaga nagari yang sudah ada kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan nagari, sehingga kita juga dapat memberikan saran agar pembangunan yang terjadi bisa efektif

Setelah masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, nantinya lembaga nagari akan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk membahas apa saja keluhan atau keinginan masyarakat yang memiliki dampak yang lebih penting bagi masyarakat untuk diajukan pada forum resmi nagari. Hal itu terjadi karena masyarakat tidak menyampaikan pada rapat lembaga akan tetapi hanya menyampaikan pada waktu bertemu atau berpapasan di jalan dengan anggota lembaga nagari tersebut, sehingga lembaga nagari harus memilah terlebih dahulu setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

3. Terbaginya masyarakat ke dua kelompok

Ruang lainnya yang terbentuk dan ada di nagari muaro paiti adalah terbaginya masyarakat ke dua kelompok, ini terjadi sebagai respon dari hasil pemilihan wali nagari yang diadakan di Nagari Muaro Paiti. ada kelompok yang mendukung

pemerintah karena memang memilih wali nagari yang menjadi wali nagari pada saat ini, dan ada juga yang menentang setiap hal yang dilakukan oleh pemerintahan wali nagari yang sekarang karena memang bukan pilihan mereka.

Kelompok yang menentang biasanya hadir dari sekumpulan orang yang mendudukng calon lainnya pada pemilihan wali yang ada di nagari, mereka biasanya selalu menyebarkan narasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah nagari yang mereka anggap tidak memuaskan. Kedua kelompok ini memiliki tujuan yang berbeda, yang satu selalu menyebarkan respon positif baik dilakukan secara media sosial maupun secara langsung, sedangkan yang kontra akan selalu menyebarkan hal yang pesimis, seperti observasi yang penulis lakukan di salah satu akun media sosial salah satu tokoh yang kontra akan kebijakan nagari dibawah ini beserta kasus yang menjadi pemicu narasi di lingkungan masyarakat nagari.

Seperti sebuah peristiwa kerusakan jalan perkebunan di daerah tangai, mereka merasa pemerintah nagari tidak peduli terhadap keluhan mereka. Hal itu disimpulkan karena kerusakan tersebut sudah dilaporkan berulang kali dan menurut mereka belum ada tanggapan dari pemerintah nagari. Pada pihak kelompok yang pro pemerintah nagari, mereka beranggapan bahwa pemerintah nagari sudah menanggapi dan sedang melakukan penyusunan anggaran. Setelah melihat masyarakat saling menanggapi pada postingan media sosial salah seorang masyarakat nagari tersebut, maka pada akhirnya pemerintah nagari memberikan bantuan berupa kayu dan bahan yang dibutuhkan dengan kerja sama masyarakat untuk bergotong royong dalam pelaksanaan pembangunannya (Observasi, 22 Oktober 2022)

Gambar 4. 4 Pelaksanaan Perbaikan Jalan



Sumber : Dokumentasi Nagari, Agustus 2022

Di lapangan peneliti menemukan fakta bahwasanya kedua kelompok akan selalu saling beradu argumen terhadap suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nagari, oleh karena itu penulisi menganggap bahwa ini juga merupakan ruang pada pola informal bagi masyarakat nagari dalam ikut mewujudkan partisipasi pada pembangunan nagari. Meskipun berpartisipasi dengan ruang yang berbeda dari biasanya, namun hal ini memberikan kontribusi yang cukup nyata karena berhasil direspon dengan tindakan langsung oleh pemerintah (Observasi 22 Oktober 2022).

4. Membangun Relasi Individu Atau Kelompok

Kegiatan ini dilakukan dengan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi kebijakan serta keputusan terkait kebijakan. Biasanya kegiatan ini akan dilakukan dengan cara datang ke rumah tokoh politik di nagari, tujuannya adalah untuk menanyakan terkait anggaran pembangunan yang ada di wilayah nagari. Menurut beberapa pihak cara ini merupakan jalan tol yang dimana mereka menemukan kesepakatan terlebih dahulu lalu nanti di forum merupakan bentuk simbolisasi saja dari apa yang sudah di sepakati dibelakang. Namun untuk saat ini sudah

sangat jarang hal ini terjadi karena sudah jarang mereka bisa bertemu secara individu dengan elit nagari (Wawancara, Aza 29 Oktober 2022).

Oleh karena itu, dengan tidak efektifnya cara perseorangan tersebut sekarang mereka lebih suka menggunakan basis kelompok, kegiatan ini dilakukan oleh beberapa orang selaku anggota atau pemimpin kelompok, dengan tujuan yang sama. Kegiatan kelompok di Nagari Muaro Paiti berbentuk kelompok pertanian dan kelompok perternakan, kegiatan yang biasa mereka lakukan adalah melakukan musyawarah terkait infrastruktur pertanian dan perternakan, seperti membahas jalan pertanian, kualitas produk serta meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota kelompok dikarenakan kesamaan pekerjaan dan tempat kerja yang dilalui setiap harinya (Wawancara, Fahru, 24 Oktober 2022). Dengan adanya kelompok mereka beranggapan bahwa agar lebih mudah mengakomodir keinginan mereka untuk disampaikan kepada pihak pemerintah karena memiliki kesamaan keinginan dengan mobilisasi jumlah massa yang cukup banyak, seperti yang disampaikan narasumber berikut:

“lai nampak banyak ughang nan prolu ro e tek jadi koklai copek tuwuikn kondak wak e, sobab kok ndo e kotong lo wak nyampai aspirasi ntuaikn keinginan individu dk ughang suak” (Wawancara, Ranum, 26 Oktober 2022).

Terjemahan: Agar terlihat banyak orang yang sama-sama menginginkan hal yang dibutuhkan tersebut sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih cepat merealisasikan keinginan dari masyarakat tersebut, karena kalau hanya kita sendiri-sendiri nanti mereka sangka itu hanyalah kebutuhan individu dari setiap masyarakat.

Gambar 4. 5 Kunjungan Anggota DPRD



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 28 Oktober 2022

Cara tersebut terbukti efektif dengan turunnya beberapa pejabat yang ada ke lapangan atau ke tempat pertanian mereka. Beberapa pejabat pemerintahan bahkan juga membantu mereka dalam memberikan anggaran bantuan berupa alat atau bibit pertanian. Selanjutnya untuk mempertahankan hubungan yang baik tersebut, akan dilakukan juga berbagai kegiatan oleh kelompok dengan para pejabat yang ada, diantaranya adalah::

- Ngopi bareng
Kegiatan ini biasanya dilakukan dalam beberapa bulan sekali ketika pejabat daerah pergi ke wilayah Kenagarian Muaro Paiti, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pemuda nagari untuk mengetahui perkembangan kebijakan yang ada di ibu kota kabupaten.hal ini sangat wajar mengingat jarak yang cukup jauh dari Nagari Muaro Paiti menuju Pusat Kabupaten Lima Puluh Kota (Wawancara, Rando, 1 November 2022).
- Menjalin hubungan komunikasi melalui telepon
Memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan membuat masyarakat yang bersifat individu atau kelompok yang ada di Nagari Muaro Paiti mencari

cara agar hubungan dengan pemerintahan daerah tetap berjalan baik, salah satunya melalui via telepon (Wawancara, Zaka, 1 November 2022).

Gambar 4. 6 Kegiatan Membangun Relasi



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 28 Oktober 2022

Dalam kehidupan masyarakat di Nagari Muaro Paiti, tidak ada masyarakat yang melakukan cara anarkis terkait penyampaian atau respon ketika aspirasi tidak dikabulkan oleh pemerintah. Hal itu terjadi karena kehidupan adat istiadat yang masih melekat kental, sehingga rasa saling menghargai masih ada meskipun aspirasi atau keinginan mereka tidak tersalurkan dengan baik oleh pemerintah nagari.

“Min kabacokak lo wak kali badunsanak e nyia cala tido, awak iduik ka mode ko tia nyia, basitogang kini suakgi elok yo tia wak liak nyia, lai tia masso suak nyia awak nan mambuek tu ughang nan nuwuik jo awak” (Wawancara Rito, 25 Oktober 2022).

Terjemahan: Kalau kita berkelahi sesama suku biarlah tidak terjadi, kita hidup akan tetap seperti ini, bertengkar sekarang besok kita juga baikan, pasti ada masa dimana kita yang akan diikuti oleh orang.

Setiap persoalan atau ketidakpuasan yang hadir dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat nagari biasanya hanya merespon dalam waktu yang

sebentar. Mereka tidak berlarut dalam masalah tersebut, karena bagi mereka menghormati setiap kebijakan merupakan simbol penghormatan untuk pemerintah apalagi dalam kehidupan yang beradab setiap orang harus memiliki rasa saling menghormati satu sama lain meskipun ada rasa ketidaksamaan kepuasan dari hasil yang sudah di implementasikan (Wawancara, Cuek, 1 November 2022).

Pola dan ruang partisipasi masyarakat Nagari Muaro Paiti mengalami perubahan dari sebelum terjadinya wabah covid-19. Sebelum Covid-19 melanda, hanya beberapa masyarakat yang aktif berpartisipasi, masyarakat cenderung tidak merespon setiap kebijakan yang dihasilkan. Hal itu berubah ketika Covid-19 terjadi, masyarakat lama berdiam diri dirumah dan menyebabkan penggunaan internet semakin meningkat, akhirnya masyarakat banyak mendapatkan informasi dan wawasan yang berguna untuk kehidupan mereka khususnya dalam pola penyampaian aspirasi terkait pembangunan serta kebijakan yang terjadi di Nagari Muaro Paiti. (Observasi, 28 Oktober 2022).

Dari data yang sudah peneliti dapatkan diatas terkait pola penyampaian aspirasi oleh masyarakat Muaro Paiti, dengan memahami keadaan di lapangan, peneliti melihat bahwasanya masyarakat Nagari Muaro Paiti sudah ikut aktif dalam berpartisipasi dan sudah paham terkait cara menyampaikan aspirasi, namun hanya pada ruang informal. Hal itu dikarenakan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui anggota lembaga atau organisasi, serta tokoh masyarakat terkait yang ada di Nagari Muaro Paiti sesuai dengan aspirasi yang mereka ingin sampaikan ke Pemerintahan Nagari Muaro Paiti (Observasi, 29 Oktober 2022).

BAB V

AKTOR-AKTOR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pada Bab V ini penulis membahas mengenai aktor antara adat dan elit desa dalam pengambilan keputusan pembangunan di Nagari Muaro Paiti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui aspirasi politik siapa yang banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti. Dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa elit adat yang difasilitasi oleh pemerintahan nagari yang memegang kekuatan utama dalam setiap keputusan yang ada di Nagari Muaro Paiti, hal itu terjadi karena wali nagari yang sekarang menjabat juga merupakan tokoh adat di nagari. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan pada pembahasan dibawah ini yang akan memperlihatkan bagaimana dominasi yang terbentuk dari hubungan antar aktor dan bagaimana pemerintah nagari memfasilitasi adat dalam memberikan aspirasinya terkait keputusan pembangunan infrastruktur.

A. Dominasi Adat Dalam Pengambilan Keputusan

Tokoh adat merupakan orang yang memiliki jabatan adat dalam suatu suku yang ada di Nagari Muaro Paiti. Mereka merupakan satu orang yang diutamakan dalam kehidupan di Nagari Muaro Paiti, menghubungkan masyarakat Nagari Muaro Paiti dengan Pemerintah Nagari Muaro Paiti, memiliki tugas untuk memimpin sekelompok orang dalam suku tertentu dan tentunya dapat menjadi orang yang mewakili suara atau keinginan dari para anggota suku. Oleh karena itu elit nagari sangat mengutamakan tokoh adat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Nagari Muaro Paiti, karena faktor tokoh adat yang bisa memobilisasi massa terkait keputusan yang akan dilakukan dan aktor adat juga bisa mempengaruhi anggota suku dalam memberikan sudut pandang untuk tetap mendukung keputusan atau menentang keputusan yang telah disepakati tersebut (Wawancara, Aidil, 27 Oktober 2022). Dengan pendapat yang disampaikan narasumber diatas maka ketidaksamaan pola pikir dan keinginan dari keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah nagari dengan tokoh adat atau kepala suku di Nagari Muaro Paiti tentu saja akan berakhir dengan kegagalan pelaksanaan

keputusan yang hadir di tengah kehidupan masyarakat (Observasi, 27 Oktober 2022).

Dalam menyikapi perbedaan pandangan yang terjadi antara aktor adat dan elit nagari, dengan keadaan adat yang masih kental, musyawarah masih menjadi cara terbaik yang dilakukan oleh para tokoh adat maupun elit nagari dalam mencari serangkaian solusi yang disebabkan adanya suatu permasalahan atau keputusan yang tidak saling menguntungkan. Tidak ada konflik fisik yang terjadi karena sikap saling menghargai dan kultur budaya yang memang dari turun temurun lebih suka bermusyawarah mencari mufakat sesuai dengan semboyan adat. Namun setiap tokoh tentu saja memiliki sebuah kepentingan, baik mewakili suku atau kepentingan pribadi dari suatu hasil kebijakan yang sedang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan, hal ini tentu saja kurang baik apalagi akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat (Observasi, 28 Oktober 2022).

Meskipun sering memiliki perbedaan pendapat antar elit, mereka tetap memiliki hubungan yang baik, hal itu terjadi karena latar belakang wali nagari yang saat ini menjabat juga memiliki gelar kebesaran adat. Oleh karena itu, pada saat kepemimpinan wali nagari yang sekarang lebih mudah dalam melakukan komunikasi terkait hal yang rasanya harus di musyawarahkan agar tidak terjadi konflik yang besar di nagari antara elit adat dan elit nagari. Hubungan yang erat antar lembaga nagari dan lembaga adat karena latar belakang pemimpin nagari saat ini merupakan sisi positif dari hubungan antar aktor yang ada di Nagari Muaro Paiti karena dengan hubungan yang baik maka akan menjadi suatu nilai tambah untuk menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan keputusan pembangunan dan diharapkan dapat menghindari akan terjadinya tarik ulur kebijakan yang alot demi memudahkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Nagari Muaro Paiti (Wawancara, Datuak Bandaro 28 Oktober 2022).

Hubungan yang positif tersebut tentu saja hanya menurut aktor adat yang juga menduduki posisi penting di berbagai lembaga pemerintah nagari, namun bagi sebagian masyarakat biasa tentu saja hubungan yang terjalin antar aktor diatas merupakan hal yang negatif. Hal itu menjadi negatif karena mereka tidak bisa ikut

serta dan hanya akan berakhir sebagai pengikut dari setiap keputusan yang di dominasi oleh aktor adat, karena jelas yang akan dirugikan atas hubungan yang mereka jalin adalah masyarakat yang tidak memiliki kekuatan atas adat.

Dalam memutuskan kebijakan pembangunan yang ada di nagari, ada beberapa tahapan yang terjadi dan sudah menjadi kebiasaan yang semestinya dilakukan oleh aktor adat dan nagari. Dialog atau perbincangan merupakan proses pertama yang di perlukan dan dilakukan agar dapat terjadinya sinergitas dominasi antar tokoh dalam pengambilan keputusan, namun pada tahap ini akan sering terjadi perbedaan pandangan antar tokoh yang memiliki kewenangan dan kepentingan. Pada proses ini, semua aspirasi dari segala pihak akan diterima untuk dilanjutkan dalam penyaringan terkait ide-ide mana yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dan sejauh mana ide tersebut berdampak pada masyarakat menurut para tokoh elit.

“Biaso wak lai nan namo bakampuang mamak, atau rapek adat nan dimano kektu wak manyampai ide j hal-hal yang diraso apolagi nan di kaduan dek kemanakan k awak sebagai mamak” (Wawancara, Datuak Bosa, 28 Oktober 2022).

Terjemahan: Biasanya kita ada yang namanya rapat adat, yang merupakan tempat untuk kita menyampaikan ide dan hal yang memang menjadi aduan atau kendala oleh anggota suku dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Setelah melakukan dialog dan menentukan pilihan dari saran dan pandangan antar tokoh, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membangun kepercayaan antar elit. Proses ini cukup membutuhkan waktu karena tidak mudah untuk memberikann kepercayaan atas keputusan yang akan dilaksanakan, sering terjadinya kekhawatiran akan gagalnya kebijakan yang diputuskan dan tidak saling mengunggulkannya kegiatan yang akan dilaksanakan menurut antar elit akan menjadi masalah ketika pelaksanaan dimulai (Wawancara, Izen 1 November 2022).

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah caraa agar mendapatkan kepercayaan dari tokoh adat, hal tersebut dinilai penting karena merupakan sebuah langka positif dan sangat menentukan bagi pemerintah Nagari Muaro Paiti.

Alasannya, dengan mendapatkan kepercayaan tokoh adat berarti mereka juga mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat yang ada secara kehidupan beradat, mengingat dalam kehidupan beradat datuak atau niniak mamak merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah suku. Komitmen yang mereka berikan dalam melaksanakan kebijakan akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kolaborasi yang dihasilkan. Karena terkadang sebuah keputusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan beberapa aktor yang terlibat, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat dari sudut pandang niniak mamak dalam persukuan mereka, seperti yang dikatakan narasumber sebagai berikut:

“Sodo kaba jo rencana di nagoghi ko kalau bisa diba babincang niniak mamak lu, sobab elok j buwuak suak ka kakun ia tia tompek ngadu nyia” (Wawancara, Yuswar 2 November 2022).

Terjemahan: Semua kabar rencana keinginan yang akan diputuskan kalau bisa dimusyawarahkan dulu dengan petinggi adat, karena baik dan buruk atas semua keputusan yang akan dilakukan tetap kepada mereka juga kita akan mengadu.

Pada tahap terakhir, ketika visi dan misi dalam sebuah kebijakan yang sudah disepakati bersama antara pihak pemerintah dan tokoh adat yang tentunya memiliki tujuan yang sama dan kepentingan yang juga saling menguntungkan antar tokoh akan dilanjutkan pada forum resmi. Dalam hal ini tentunya akan disepakati ketika forum musyawarah nagari berlangsung bersama pihak kecamatan dan dinas terkait, serta tokoh masyarakat agar rancangan kebijakan tersebut juga dapat di dengar dan ketahui oleh semua kalangan di nagari dan akan ditambah dengan beberapa pandangan dari tokoh masyarakat yang mewaakili masyarakat pada ruang partisipasi informal. (Wawancara, Zul, 1 November 2022).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami dominasi adat dalam pengambilan keputusan di Nagari Muaro Paiti terjadi karena kekuatan mereka secara historis dalam kepemilikan tanah dan masa anggota suku, sehingga menjadi alasan mereka yang harus diutamakan, serta kepemimpinan di berbagai jabatan strategis yang membuat mereka juga mudah dalam menentukan keputusan yang mereka

inginkan. Selain itu dominasi yang terjadi juga diakibatkan karena difasilitasinya mereka oleh pemerintah nagari untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan akan tetapi dengan gelar kebesaran adat yang mereka miliki, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam bersuara dan berekspresi dibandingkan dengan masyarakat biasa atau masyarakat yang tidak memiliki jabatan secara adat di nagari. Kehidupan yang juga masih tradisional belum tercampur dengan budaya luar juga membuat dominasi adat masih merupakan hal yang cukup wajar, karena memang sistem yang dibangun sudah berjalan sejak zaman dahulu kala, adapun lapisan masyarakat yang sudah mulai mengetahui pentingnya berpartisipasi juga belum maksimal memberikan perlawanan terhadap dominasi adat karena sifat saling menghargai dalam kehidupan adat nagari yang masih sangat kental.

B. Kepentingan Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur

Dominasi adat dalam keputusan di Nagari Muaro Paiti tentunya dilandasi oleh berbagai kepentingan yang ada antar elit adat yang ada di nagari. Dalam proses pembangunan infrastruktur yang terjadi antara tokoh adat dan elit nagari, elit adat adalah aktor yang memiliki kekuatan karena mereka sebagai penyeimbang di dalam kehidupan bermasyarakat dan beradat, sehingga pemerintah nagari memfasilitasi segala hubungan antar pemimpin nagari dan tokoh adat agar tetap bisa berjalan dengan baik di Nagari Muaro Paiti sebagaimana seperti yang sudah dibahas pada pembahasan pertama (Observasi, 2 November 2022).

Kekuatan elit adat dibuktikan dari hasil keputusan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja nagari, yang mana keputusan ini di buat dalam forum formal musyawarah nagari, sehingga sah secara hukum dan peraturan yang berlaku, meskipun tidak semua keinginan dan kepentingan mereka yang terealisasi akan tetapi sebagian besar dari keinginan mereka bisa tercapai dalam wujud ikut serta dalam mengatur dan mengawasi pembangunan yang terjadi di nagari, sedangkan bagi masyarakat keinginan mereka juga ada beberapa yang dilaksanakan, tergantung bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi mereka tersebut melalui tokoh masyarakat yang ada di nagari, masyarakat juga tidak dapat berbuat banyak karena hasil tersebut dibuat oleh orang yang mereka hormati dalam kehidupan bersuku.

Tabel 5. 4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari

No	Nama Anggaran	Biaya Anggaran
1.	Pendapatan Nagari	
1.1	Pendapatan Asli Nagari	Rp.216.000.000
1.2	Transfer	Rp.2.856.703.100
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp.25.000.000
2.	Belanja Nagari	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.1.033.656.996
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.1.464.583.293
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.108.519.713
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.88.092.917
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.512.150.000
3.	Pembiayaan Nagari	
3.1	Penerimaan	Rp.109.299.819
3.2	Pengeluaran	Rp.0

Sumber : Arsip Nagari, 3 November 2022

Setiap kebijakan serta kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya bisa terelaisai atas sepengetahuan pemangku adat yang ada di nagari. Kegiatan itu terkadang lebih memiliki manfaat bagi elit adat, dimana pembangunan infrastruktur jalan lebih sering melewati titik tanah mereka untuk dijadikan lokasi pembangunan. Hal itu dilakukan karena dapat menaikkan nilai nvestasi terhadap tanah di dekat lokasi pembangunan, memudahkan perjalanan mereka ke lokasi pertanian yang akan mereka miliki. ketika menuju lahan pertanian tersebut. Berbeda dengan masyarakat, yang terkadang sudah sangat menginginkan jalan pertanian mereka diperbaiki, akan tetapi belum juga kunjung terwujud, namun jika hal tersebut adalah keinginan dari orang yang memiliki pengaruh, itu tentu merupakan hal yang mudah untuk diproses dalam perencanaan anggaran.

Kepentingan adat yang masih kental ini tidak terlepas juga dari perang kepentingan antar elit dalam jumlah kelompok yang kecil, dimana para elit juga berusaha memberikan dampak pembangunan bagi kelompok suku mereka sendiri, karena kehidupan bersuku tidak seperti kehidupan masyarakat modern, dalam kehidupan bersuku setiap anggota suku akan mementingkan kepentingan sukunya masing-masing terlepas dari sedikit banyaknya dampak yang diberikan bagi masyarakat umumnya. Hal itu terjadi karena setiap suku memiliki wilayahnya masing-masing dan tentunya pembangunan yang terjadi akan diusahakan berada di daerah mereka.

Meskipun masih memiliki manfaat bagi setiap masyarakat yang tinggal di wilayah kenagarian Muaro Paiti, namun dampaknya kurang dirasa signifikan dan memuaskan bagi sebagian masyarakat. Seperti kegiatan atau kebijakan pembangunan jalan lingkar nagari yang dimana ada beberapa titik yang jarang dilalui oleh masyarakat yang membuat jalan tersebut nantinya tidak diperhatikan dari segi perawatan infrastruktur. Jalan itu terkadang hanya terpakai ketika pemerintah melaksanakan pendataan dan ketika adanya kegiatan adat yang biasanya terjadi ketika ada acara besar atau pernikahan anggota suku (Wawancara, Dede 1 November 2022). Selain itu ada juga beberapa pembangunan saluran irigasi yang kurang tepat pada titik yang membutuhkan, serta terkadang

pembangunan yang hanya terkesan ada kegiatan tanpa melihat manfaat secara menyeluruh bagi masyarakat.

Dengan hasil yang kurang menguntungkan bagi semua pihak, maka pemerintah nagari belum berhasil mewujudkan Peraturan Bupati nomor 89 tahun 2019 pasal 39 terkait dengan elit desa yang dilarang merugikan kepentingan umum, menguntungkan diri sendiri atau kelompok, serta melakukan tindakan diskriminatif. Alasannya karena pemerintah nagari belum mampu menampung aspirasi dari berbagai pihak dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan tidak merugikan pihak manapun di Nagari Muaro Paiti (Observasi, 2 November 2022).

Meskipun pada akhirnya aspirasi elit lebih diwakili oleh pemerintah nagari dalam perencanaan pembangunan, namun pemerintah nagari juga tetap memasukan beberapa aspirasi masyarakat yang dirasa sudah sangat penting dan genting untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi dalam pengerjaan tetap akan diberikan kepada kelompok-kelompok yang memberikan dukungan pada saat awal pemilihan wali nagari. Hal tersebut merupakan sesuatu yang dianggap wajar pada proses politik yang ada di Nagari Muaro Paiti karena dianggap sebagai balas budi atas dukungan yang telah diberikan selama proses pemilihan dan juga sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang dilakukan sebelumnya dalam mengukung elit desa. Selain itu mereka juga memiliki tujuan untuk memberikan perkerjaan bagi orang terdekat, baik itu anggota suku maupun anggota keluarga.

Keputusan selanjutnya yang diambil oleh elit nagari adalah dengan cara penempatan jabatan kepada orang-orang yang berjasa dan tentunya jabatan yang diberikan berada pada pos strategis di Nagari Muaro Paiti. Jabatan tersebut antara lain sebagai pengurus pasar, pengurus natura atau petugas pengelola hasil nagari mereka juga akan menempatkan orang terdekat atau yang berada di lingkungan dekat pemerintahan terkhusus dari golongan adat, kesukuan dan keluarga (Wawancara, Aidil, 1 November 2022). Penempatan jabatan tersebut tentunya bertujuan untuk mempermudah kordinasi antar elit yang ada dan juga mempermudah dalam membuat kebijakan yang dilaksanakan secara formal dalam forum resmi di nagari, karena tidak akan mungkin konflik terjadi kalau sesuatu

sudah disepakati dalam gambaran besar dari sebelum forum dimulai melalui fasilitasi melalui forum adat.

Selain anggaran nagari, tokoh elit juga mengatur anggaran yang berasal dari dana aspirasi anggota dewan daerah yang berasal dari nagari Muaro Paiti, akan tetapi dengan lingkup yang lebih kecil. Hal itu disebabkan karena tidak semua tokoh memilih atau berpihak dengan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang berasal dari nagari tersebut, sehingga hanya elit yang memiliki suku yang sama dengan anggota dewan yang biasanya bisa mengatur dan memberikan pandangan secara jelas, sedangkan elit yang lain hanya sekedar memberikan masukan. Disini masyarakat biasa bisa mendapatkan keuntungan, namun hanya dengan lingkup kecil, masyarakat yang dimaksud adalah tangan kanan atau tim sukses ketika pemilihan legislatif yang sudah dilaksanakan (Observasi, 2 November 2022).

Semua hal yang dilakukan oleh elit beralasan agar ekosistem adat budaya yang tradisional tetap dapat terjaga, dan marwah mereka sebagai pemilik wilayah juga bisa terlihat memiliki kekuatan bagi masyarakat, karena sebagian elit merasakan kekhawatiran melihat modernisasi yang terjadi akan membuat sistem adat akan mulai terlupakan bagi generasi berikutnya. Namun hal ini juga tidak bisa dibenarkan secara menyeluruh, karena aspirasi dari masyarakat yang tidak memiliki kekuatan sosial di nagari tidak akan bisa tersalurkan dengan baik dalam pembangunan yang dilaksanakan di nagari, selain itu dominasi yang berlebihan juga akan membuat masyarakat mulai resah yang berakibat pada konflik, nantinya adat yang awalnya dihargai akan dianggap musuh dan itu akan terlalu berbahaya pada ekosistem sosial yang ada di nagari. (Observasi, 2 November 2022).

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwasanya adat masih sangat berpengaruh di nagari, apalagi sebagian aparatur pemerintah nagari juga merupakan orang yang memiliki latar belakang atau kedekatan dengan adat, aspirasi keinginan masyarakat masih belum bisa dilanjutkan secara menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di nagari. Adapun yang lebih sering ditindaklanjuti adalah penyampaian aspirasi melalui elit adat dari anggota kaum yang memang memiliki hubungan tali persukuan yang

sangat dekat, sedangkan bagi masyarakat yang kapasitasnya adalah warga biasa dalam adat lebih sulit agar aspirasi mereka bisa tersalurkan.

Kegiatan Pembangunan yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti tetap sesuai dengan prosedur yang ditentukan, hanya saja pada pelaksanaan di lapangan menggunakan asas rekognisi dan subdiaritas dari kehidupan masyarakat nagari. Oleh karena itu tidak ada masalah dalam konsep peraturan, hanya saja seringkali terjadi perbedaan pendapat antara beberapa tokoh yang ada di nagari, namun hal itu juga tidak terjadi dalam waktu yang lama.

Namun hal yang terjadi di Nagari Muaro Paiti tidak dianggap sesuatu yang mengejutkan bagi masyarakat yang memang asli dan sudah lama bermukim di nagari, karena sistem ini memang sudah bertahan lama dan mungkin tidak akan berakhir selama adat masih dipegang kuat dan diyakini sebagai salah satu pedoman dalam menjalani kehidupan oleh masyarakat asli nagari. Adapun pihak yang merasa tidak puas akan segera diredam oleh elit adat dengan bujukan atau kalimat penenang agar suasana kembali stabil dan membaik dan juga akan diberikan kesempatan untuk bertarung pada pemilihan wali nagari berikutnya agar keinginan mereka juga bisa terealisasi sepenuhnya.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai tata kelola pemerintahan Nagari Muaro Paiti dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, partisipasi masyarakat pada tata kelola pemerintahan nagari merupakan diskursus yang masih jarang di bahas dalam perbincangan keilmuan sosial dan politik. Pola dan ruang partisipasi yang beragam memiliki satu tujuan yaitu untuk saling ikut serta dalam pertumbuhan pembangunan di nagari, meskipun lebih banyak diwakili oleh tokoh masyarakat, akan tetapi masyarakat sudah merasa cukup puas dengan hasilnya karena lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pola dan ruang secara informal lebih disukai masyarakat Nagari Muaro Paiti dalam memberikan aspirasi, karena tidak terikat waktu dan mereka bisa menyampaikan aspirasi kepada orang yang mereka anggap lebih paham dari pada mereka terkait hal tersebut. Hal ini merupakan sebuah langkah maju dalam tingkat partisipasi masyarakat terhadap tata kelola nagari karena kesadaran masyarakat sudah terbentuk dalam ikut berpartisipasi.

Kedua, keberadaan adat yang masih kental apalagi sebagai pemilik wilayah secara historis membuat posisi adat sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan yang terjadi, ditambah lagi dengan kehadiran berbagai lapisan elit yang hadir dalam pemerintahan sebagai pemegang utama kekuasaan yang sah secara undang-undang membuat mereka semakin berperan penting dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan. Hal itu juga membuat mereka lebih mudah untuk mengatur pembangunan yang terjadi di Nagari, sehingga menyebabkan adanya dominasi dan kepentingan mereka yang bisa difasilitasi oleh pemerintah, selain itu elit adat juga sebagai pengawas dari setiap kebijakan yang diputuskan serta menjadi tempat aduan pertama bagi warga suku atau kaum adat untuk menyalurkan aspirasinya terhadap pemerintah nagari.

Ketiga, kontribusi pada teori penelitian ini adalah membuktikan hal yang di kemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1990) bahwa di dalam

masyarakat tradisional, pemerintah dan politik biasanya hanya merupakan unsur satu golongan elit yang kecil dan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, yang bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif, yang berfokus pada kegiatan yang dilakukan bukan terhadap sikap politik seseorang, dalam partisipasi, sukarela dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, namun belum sampai ke tahap demokrasi musyawarah bagi seluruh elemen yang ada dilapisan masyarakat. Selain itu juga terkait bentuk partisipasi yang terbagi atas ruang dan pola dalam penulisan, meskipun belum semuanya bisa tercapai, setidaknya bentuk partisipasi itu ternyata benar adanya dalam lingkungan masyarakat nagari.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang bisa peneliti sampaikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk masyarakat, dalam menyampaikan aspirasi terhadap suatu keinginan kepada pemerintah Nagari Muaro Paiti agar lebih sering untuk di sampaikan pada forum resmi di kegiatan Nagari. Muaro Paiti, sehingga bisa untuk diskusikan menjadi aspirasi yang tergambar lebih serius, matang dan penuh pertimbangan. Hal tersebut penting karena selama ini kebanyakan aspirasi hanya terucap maupun di sampaikan berbentuk sekedar omongan di warung kopi atau ketika bertemu di jalan, yang berpotensi mengakibatkan hadirnya konflik sosial dan kepentingan, terlebih lagi kalau menjadi suatu alasan untuk kita menjadi berprasangka buruk terhadap kebijakan yang di hasilkan Pemerintah Nagari Muaro Paiti.
2. Kepada Pemerintah Nagari Muaro Paiti, agar lebih responsif terhadap aspirasi dari setiap lapisan masyarakat, agar tidak terjadi kecemburuan sosial di tengah kehidupan masyarakat, apalagi karena kita hidup di tengah kehidupan beradat yang masih kental. Jadi masyarakat biasa dan tidak memiliki kekuatan adat juga tidak berkecil hati dalam setiap aspirasi yang mereka sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Mohamad. (2014). *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Apriani, Sonia. (2020). *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa*
- Amanulloh, Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa*. Dalam Kementerian Desa.
- Amin, Khairul. (2017). *Elit Dan Kekuasaan Padaa Masyarakat Desa*. Dalam Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.
- Anwar, Chairul. (2017). *Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, Icha Shintia. (2019). *Analisis Pengelolaam Dan Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat*. Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung.
- Furchan, Arief. (2007). *Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H, Partini. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Balatangnya*. Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Huntington, Samuel P., & Joan Nelson. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junaidi. (2015). *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang*. Dalam Naaskah Publikasi Fisip Umrah.
- Mukhlilis, Ahmad. (2015). *Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa*. Dalam Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Marsh, David dan Gerry Stoker. (2011), *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

- Masnijon. (2021). *Pilkada di Tengah Pandemi*. Tanjung Pati: KPU Lima Puluh Kota.
- Muslimin, B Putra. *Potensi Maladmisnistrasi Pengelolaan Dana Desa*. Dalam ombudsman.go.id.
- Nirmala. (2018). *Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat*. Dalam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Niswanti, Rahmi. (2019). *Pemanfaatan kampung seni jelekong sebagai sumber belajar IPS*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ndegong, Gusti Otto. (2015). *Demokrasi Sebagai Kontrol Publik*. dalam Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero.
- Nugroho, Setyo. (2014). *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan*, Dalam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Palimbong, Hairil. (2018). *Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*. Dalam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Putra. *Musrembang Pembahasan Dan Penetapan RKP*. dalam Nagari Muaro Paiti: <https://muaropaiti-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2022/10/3/musrembang-pembahasan-dan-penetapan-rkp-2023-dan-du-rkp-2024-nagari-muaro-paiti>, diakses pada 4 November 2022.
- Rahardjo Mudjia, (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Dalam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana.
- Riskayanti. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rush, Michael dan Althoff, Philip. (1986). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. (2016). *Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Dalam Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Tomoning, Yaremas. (2013). *Politik Lokal Tingkat Desa*. Dalam Jurnal Ilmu Politik.
- Yusuf, Muri. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Indra Pratama Mandiri.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Foto Kegiatan Wawancara





Lampiran 2

Biografi Penulis



A. Identitas Diri

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Hamdillah Afdhal |
| 2. Nim | : 1806016040 |
| 3. Tempat/Tanggal Lahir | : Batusangkar, 03 September 1999 |
| 4. Alamat | : Sungai Panjang Indah, Nagari Muaro Paiti |
| 5. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. No. HP | : 082285336405 |
| 8. Email | : Hamdilahafdal19@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 03 Muaro Paiti
2. SMPN 1 KAPUR IX
3. SMAN 1 KAPUR IX

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Desember 2022

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hamdillah Afdhal', with a horizontal line drawn across the bottom of the signature.

Hamdillah Afdhal

NIM. 1806016040